BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 16 TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan asumsi ekonomi makro yang berbeda dari proyeksi awal, baik pada tataran nasional maupun daerah, yang memerlukan penyesuaian kerangka pendanaan dan prioritas program agar tetap realistis dan dapat dilaksanakan, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada semester pertama Tahun 2026 yang menunjukkan beberapa program dan kegiatan memerlukan penyesuaian, baik target, anggaran, maupun penyelarasan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, sehingga RKPD sebagai jabaran tahunannya perlu diselaraskan agar keduanya berjalan dalam satu tujuan yang sama;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan RKPD tahun 2026 dituangkan dalam Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
    a. Pendahuluan;
    b. Evaluasi hasil Triwulan II (dua) tahun berkenaan;
    c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
    f. Penutup.
(2) Dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan koordinasi lingkup Asisten Sekretaris Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Perubahan RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
a. pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan-APBD dan perubahan PPAS;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Bekasi dengan segala dinamikanya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk, kota penyangga ibu kota yang terus tumbuh, dan kota yang menyimpan jutaan harapan warganya, terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan Kota Bekasi itu tidak selalu berjalan lurus sesuai rencana. Kadang ada kejutan dan kadang ada perubahan yang datang lebih cepat dari yang bisa diantisipasi. Di sinilah perencanaan pembangunan dituntut untuk tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan menjadi instrumen yang mampu merespons realita.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah salah satu instrumen perencanaan itu. RKPD bukan dokumen birokrasi semata. Di balik angka-angka target, program, dan pagu anggaran yang tertulis di dalamnya, terdapat komitmen nyata pemerintah daerah terhadap warganya, komitmen untuk membangun jalan yang lebih baik, menyediakan layanan kesehatan yang lebih terjangkau, memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang layak, dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. RKPD, dengan demikian, adalah janji tahunan pemerintah kepada masyarakatnya.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 telah disusun dengan penuh pertimbangan, mengusung tema "Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian", sebuah tema yang tidak dipilih secara sembarangan, melainkan lahir dari pembacaan mendalam atas kondisi kota dan kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunannya dilakukan secara simultan dengan proses finalisasi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025. RKPD tersebut juga memedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Dunia di tahun 2026 adalah dunia yang tidak mudah dibaca. Perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik yang memengaruhi rantai pasok dan harga komoditas, perubahan iklim yang makin terasa dampaknya di kota-kota besar, hingga transformasi digital yang mengubah cara masyarakat bekerja, berbelanja, dan mengakses layanan. Semua ini bukan isu yang jauh dari kehidupan warga Kota Bekasi. Kondisi global dan nasional itu, pada akhirnya, selalu mendarat di kehidupan nyata warga.

Di tengah dinamika itulah, Pemerintah Kota Bekasi merasa perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Bukan karena perencanaan awal salah, melainkan karena perencanaan yang baik mensyaratkan keberanian untuk mengoreksi diri ketika kondisi berubah. Pemerintah daerah yang responsif adalah pemerintah yang tidak terpaku pada dokumen semata, tetapi pada tujuan akhir yang sesungguhnya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 ini dilatarbelakangi oleh setidaknya tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, adanya perkembangan asumsi ekonomi makro yang berbeda dari proyeksi awal, baik pada tataran nasional maupun daerah, yang memerlukan penyesuaian kerangka pendanaan dan prioritas program agar tetap realistis dan dapat dilaksanakan. Kedua, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada semester pertama Tahun 2026 yang menunjukkan beberapa program dan kegiatan memerlukan penyesuaian, baik target, anggaran, maupun kelompok sasaran agar manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Ketiga, penyelarasan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, sehingga RKPD sebagai jabaran tahunannya perlu diselaraskan agar keduanya berjalan dalam satu tujuan yang sama.

Perubahan ini dilaksanakan dalam koridor regulasi yang jelas yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu, setiap penyesuaian yang dilakukan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teknis, dan substantif.

Dalam kerangka itulah Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dilaksanakan. Perubahan tersebut adalah bentuk respons Pemerintah Kota Bekasi bahwa kondisi berubah dan rencana perlu disesuaikan. Perubahan ini juga merupakan bentuk komitmen bahwa di tengah segala perubahan dan ketidakpastian, Pemerintah Kota Bekasi tidak bergeser dari tanggung jawab utamanya: memastikan setiap warga Bekasi mendapatkan pelayanan terbaik, hidup di lingkungan yang layak, dan memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

Adapun proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 diharapkan dapat

menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap berbagai perubahan kebijakan dan untuk melaksanakan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 185);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10); dan
38. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) maupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044 merupakan salah satu yang harus dipedomani. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 terutama berkaitan dengan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk dokumen tahunan yang dipedomani yaitu berkaitan dengan RKP Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Kedua dokumen ini perlu dipedomani untuk menyelaraskan tema, prioritas pembangunan, dan kinerja sehingga Kota Bekasi dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangannya

Selain dokumen di atas, penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan II sebagai bagian masukan untuk perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi pedoman Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dimaksudkan sebagai instrumen penyesuaian perencanaan pembangunan tahunan daerah yang mampu merespons perubahan kondisi lingkungan strategis, baik pada tataran global, nasional, regional, maupun lokal, tanpa kehilangan konsistensi terhadap arah pembangunan jangka panjang dan menengah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 adalah:

1. Menyesuaikan kerangka ekonomi daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi makro terkini, baik pada tataran nasional maupun daerah, sehingga asumsi-asumsi yang menjadi fondasi perencanaan anggaran tetap realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengoptimalkan efektivitas program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD semester pertama Tahun 2026 sehingga program yang sudah berjalan benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan, dan program yang perlu disesuaikan dapat segera diperbaiki sebelum terlambat;

3. Menyelaraskan prioritas pembangunan tahunan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, serta dengan kebijakan dan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional sehingga pembangunan Kota Bekasi tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian yang bermakna dari pembangunan bangsa secara keseluruhan;
1. Memberikan kepastian perencanaan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa tahun anggaran 2026 sehingga Perangkat Daerah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun 2026.

1.5 SISTEMATIKA

Dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab II Evaluasi Hasil Pembangunan Hingga Triwulan II Tahun 2026

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah, evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan permasalahan pembangunan.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan terkait kebijakan keuangan dan proyeksi keuangan pada tahun rencana.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan hingga Triwulan II Tahun 2026, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2026

KONDISI UMUM DAERAH

POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek. Bahkan Kota Bekasi juga menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Sebagai kota yang berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban, Kota Bekasi yang juga sering dijuluki sebagai Kota Patriot atau Kota Pejuang, merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera - Jakarta - Jawa Tengah - Jawa Timur maupun poros Jakarta - Bandung.

Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Daerah yang dulunya hanya berupa sawah, saat ini telah disulap menjadi kota dengan berbagai infrastruktur yang sangat memadai. Kota Bekasi sudah dilintasi berbagai transportasi publik seperti kereta *Commuter Line*, LRT serta berbagai transportasi umum lainnya. Selain itu, keberadaan jalan tol juga makin menunjang mobilitas masyarakat.

Mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Bekasi tercermin dari kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Tingginya komuter yang masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi kota tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan di Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang berada pada 106º48’28” - 107º27’29” Bujur Timur dan 6º10’6” - 6º30’6” Lintang Selatan. Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan, memiliki luas wilayah sekitar 213,1174 km^2 atau 21.311,74 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Secara fisik geografis, ketinggian wilayah di Kota Bekasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berkisar antara 28 hingga 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Limpasan air permukaan di setiap kecamatan di Kota Bekasi rata-rata sekitar 33,92 juta m^3/tahun.

Penggunaan lahan Kota Bekasi didominasi oleh permukiman teratur (perumahan) dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Permukiman teratur yang dikembangkan developer banyak dikembangkan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang strategis untuk menampung limpahan penduduk yang bekerja di Jakarta dan di kota-kota sekitar Kota Bekasi. Penggunaan lahan terbangun lainnya diperuntukkan

untuk kawasan komersial, industri, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran, pemerintahan, perkantoran dan infrastruktur pendukung kegiatan perkotaan.

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam konteks Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai: pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; pusat perdagangan dan jasa skala regional; pusat pelayanan kesehatan; pusat pelayanan pendidikan tinggi; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bekasi diarahkan sebagai PKN yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, Nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek. Selain itu, Kota Bekasi juga diarahkan untuk menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja.

Adapun berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kota Bekasi diarahkan sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rencana struktur ruang, sistem pelayanan perkotaan Kota Bekasi yaitu:

(1) Penetapan PPK, yang berada di koridor Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani, koridor Jalan Siliwangi-Jalan Pekayon Jaya-Jalan Perjuangan-Jalan Noer Ali-Jalan Muchtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan *Central Business District* (CBD) Kota Bekasi.

(2) Penetapan SPPK meliputi:

a. SPPK Pondokgede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;

b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapanjaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapanbaru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa;
c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan dan jasa;
d. SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPST DKI Bantargebang).
e. Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, lokasi Kota Bekasi yang strategis kemudian menyebabkan tingkat persaingan penggunaan lahan menjadi sangat tinggi. Dampak langsung dari tingginya penggunaan lahan adalah semakin langkanya ketersediaan lahan untuk pengembangan kota. Kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi di Kota Bekasi berubah dari sekitar 54 persen pada tahun 2001 menjadi 73 persen pada tahun 2021 (Dewi, Taryana dan Astuti, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan terbangun di Kota Bekasi berkembang dengan sangat tinggi. Penggunaan lahan yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya harga lahan di Kota Bekasi. Keterbatasan lahan disertai dengan tingginya harga lahan menjadi tantangan utama dalam hal penyediaan lahan untuk kebutuhan pelayanan publik.

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Dengan karakter perkotaan yang dominan, potensi sumber daya alam yang ada di Kota Bekasi sangat terbatas. Potensi sumber daya alam tersebut seperti pertambangan gas dengan luas kurang lebih 3,44 ha yang terletak di Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna.

Sumber daya air di Bekasi sangat vital, terutama untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sektor pertanian. Kota Bekasi terletak pada zona Cekungan Air Bawah Tanah Bekasi Karawang dan pada 3 Daerah aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Bekasi, DAS Sunter, dan DAS Cakung. Potensi imbuhan air tanah bebas pada Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Bekasi Karawang adalah sebesar 47,0256 m3/detik. Potensi air permukaan (Sungai Bekasi) yang dapat diandalkan di Kota Bekasi saat ini adalah 9.16 m3/detik namun dengan adanya tambahan pasokan dari Jatiluhur melalui Saluran Induk Tarum Barat debit yang diandalkan dapat mencapai 44,62 m3/detik.

Di sisi lain, tanah di Kota Bekasi sebagian besar merupakan tanah aluvial yang terbentuk dari endapan sungai seperti Sungai Bekasi dan Sungai Cikarang. Tanah aluvial cenderung subur, gembur, dan kaya bahan organik, sangat cocok untuk tanaman pangan, terutama padi. Namun, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan dan

kawasan industri, menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan zonasi untuk melindungi lahan pertanian yang masih ada. Sebagian lahan di pinggiran (terutama Bekasi Timur dan Selatan) masih bisa dikembangkan untuk pertanian. Kondisi ini perlu didukung dengan kebijakan pertanian perkotaan (*urban farming*) untuk mendukung ketahanan pangan kota seiring dengan alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari.

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Hasil analisis potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dengan menggunakan data ketersediaan berdasarkan data SK.147/2023, luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RDTR Kota Bekasi, ketersediaan air tahun 2022 sebesar 130.844.849,84 m^3/tahun.

Dengan kebutuhan air Kota Bekasi sebesar 301.284.051,97 m^3/tahun, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu mencapai 170.456.164,16 m^3/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung air/ketersediaan air pada tahun 2022 secara keseluruhan sudah melampaui ambang batas. Jika dilihat dari luasannya, luas wilayah yang belum melampaui ambang batas yaitu sebesar 1.560,61 ha sedangkan luas wilayah yang sudah melampaui sebesar 19.742,98 ha.

Luas sawah eksisting di Kota Bekasi yaitu seluas 276,78 ha. Dengan asumsi 1 kg = 1300 kkal, maka ketersediaan pangannya sebesar 2.610.799.620,01 kkal/tahun. Dari hasil perhitungan, kebutuhan pangan Kota Bekasi terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Selisih ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di Kota Bekasi tahun 2022 dengan sebesar 2.030.095.735.379,97 kkal. Hal ini mengindikasikan bahwa status daya dukung pangan Kota Bekasi sudah terlampaui.

JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pada tahun 2025 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020 sebanyak 2,648 juta jiwa. Di antara seluruh kabupaten/kota, jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Bogor (5,721 juta jiwa) dan Kabupaten Bandung (3,783 juta jiwa). Sementara di tingkat kota, Kota Bekasi menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak melampaui Kota Bandung yang jumlah penduduknya sebesar 2,548 juta jiwa.

Jumlah penduduk kecamatan di Kota Bekasi tahun 2025 terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sekitar 13,23 persen penduduk, diikuti Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih, masing-masing 10,77 persen dan 10,35 persen. Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang dengan jumlah penduduk sekitar 4,26 persen.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi periode 2020-2025 rata-rata sebesar 0,85 persen dengan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan yang bervariasi. Terkait dengan kepadatan penduduk, sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 12 kecamatan, 9 diantaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km^2. Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 19 ribu jiwa/km^2.

Kepadatan penduduk tidak selalu berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk, karena faktor luas wilayah juga mempengaruhi. Berdasarkan analisis kepadatan penduduk, terlihat bahwa beberapa kecamatan seperti Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara dan Pondok Gede memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 19,135; 17,829; 16,844 dan 14,488 ribu jiwa/km^2. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang cukup pesat di wilayah-wilayah tersebut.

KOMPOSISI PENDUDUK

Komposisi penduduk Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,328 juta jiwa dan perempuan 1,319 juta jiwa. Dengan demikian, angka *sex ratio* Kota Bekasi di tahun tersebut sebesar 100,69 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Bekasi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Kelompok usia 25-39 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan jumlah total 658.169 jiwa, atau sekitar 24,9 persen dari total penduduk. Selanjutnya, data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk seiring bertambahnya kelompok usia. Ini mencerminkan tren global dalam proses penuaan penduduk juga terjadi di Kota Bekasi.

PENDUDUK KOMUTER

Kedekatan dengan Jakarta mengakibatkan banyak penduduk Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 466.260 penduduk Kota Bekasi (19,2 persen) yang melakukan komuter ke daerah lain di Metropolitan Jakarta. Dari angka tersebut, sebagian besar yaitu 68,24 persen penduduk komuter beraktivitas di Jakarta. Di antara komuter ini, 68,3 persen adalah laki-laki, sedangkan 31,7 persen adalah perempuan.

Tujuan utama dari kegiatan komuter adalah untuk bekerja yaitu sebesar 87,2 persen, sedangkan yang lainya yaitu 12,8 persen untuk menempuh pendidikan (sekolah/kuliah/kursus). Dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta, persentase penduduk komuter Kota Bekasi adalah tertinggi kedua setelah Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan utama lokasi tempat tinggal bagi penduduk komuter di Metropolitan Jakarta.

Selain sebagai tempat tinggal, Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan utama kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Angka komuter yang masuk ke Kota Bekasi merupakan tertinggi kedua setelah Kota Tangerang di antara kota-kota di sekitar Jakarta. Tingginya komuter masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN TEMATIK PEMBANGUNAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 TRIWULAN II

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, capaian IKU Kota Bekasi Tahun 2026 Triwulan II belum dapat dihitung karena levelnya berada pada *ultimate outcome*. Sebagai gambaran ketercapaiannya, capaian IKU yang digunakan yaitu tahun 2025.

Dari 22 IKU Kota Bekasi, pada tahun 2025 sebanyak 15 indikator (68,18 persen) capaiannya sangat tinggi, 3 indikator (16,64 persen) capaiannya tinggi, 1 indikator (5,13 persen) capaiannya sedang, dan 2 indikator (10,05 persen) belum dapat dihitung capaiannya. Capaian masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Bekasi merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025. Capaian IKLI Kota Bekasi sudah masuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dengan capaian kinerja sebesar 103.66 persen dari target sebesar 68.00 poin dan terealisasi 70.49 poin. Jika dilihat dari Nilai Interval Konversi (NIK), nilai 70.49 masuk ke dalam mutu pelayanan C atau kinerja unit pelayanan kurang baik.

Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan upaya-upaya yang konsisten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Ke-PU-an. Upaya yang diprioritaskan terutama berkaitan dengan infrastruktur polder mengingat salah satu fungsinya dapat untuk mengendalikan banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering melanda Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan pemerintah wilayah perbatasan seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta perlu dilakukan.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan industri dan ekonomi tanpa harus menghentikan produksi. Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK Kota Bekasi tahun 2025 belum dapat ditentukan karena belum adanya nilai realisasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Namun demikian, langkah-langkah/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca untuk menginput pada aplikasi AKSARA, untuk kemudian mendapatkan angka potensi penurunan emisi kumulatif.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi tahun 2025 mencapai 100.75 persen dari target sebesar 83,80 poin dan terealisasi sebesar 84,43 poin. Peningkatan IPM Kota Bekasi ini telah terjadi dalam kurun 5 tahun terakhir dan hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta peluang ekonomi yang lebih luas, kemungkinan besar telah berkontribusi dalam pencapaian ini.
Meskipun demikian, perbandingan dengan kota di sekitar Jakarta menunjukkan bahwa setiap kota memiliki tantangan dan potensi pembangunan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antarwilayah dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah sekitar Jakarta.

4. Prevalensi Stunting

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir pada tahun 2024, prevalensi stunting pada balita secara nasional sekitar 19,8 persen. Sedangkan untuk capaian prevalensi stunting Kota Bekasi 9,20 persen. Namun realisasi capaian tahun 2025 belum ada data yang dikeluarkan oleh Kemenkes.
Kota Bekasi terus berupaya agar target zero stunting dapat tercapai. Upaya yang akan dilakukan tentunya memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kota Bekasi seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan dalam kurun 5 tahun terakhir. Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 dan meningkat menjadi 67,90 di tahun 2025 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi “berkembang”. Ke depannya, Kota Bekasi diharapkan dapat terus melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga yang lebih baik sehingga dapat mencapai klasifikasi “tangguh”.
Untuk meningkatkan capaian iBangga Kota Bekasi, perlu dilakukan perkuatan dan perluasan intervensi program/kegiatan, misalnya melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Konvergensi program/kegiatan tersebut dapat berupa peningkatan cakupan pemenuhan administrasi kependudukan, advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pendampingan dan pelayanan pada keluarga yang rentan risiko kejadian stunting, meningkatkan cakupan layanan dan akses pendidikan, meningkatkan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, dan lainnya.

6. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dalam suatu masyarakat. IKG Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 0,181 menurun jika dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di angka 0,273. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas gender di Kota Bekasi perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan berbagai pihak tersebut untuk memastikan bahwa pengaturan komitmen, penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, penguatan data terpilah, penguatan instrumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dan penguatan partisipasi masyarakat dapat berjalan maksimal.

7. Nilai Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu masuk dalam kategori “Nindya” dan nilai KLA berada pada angka 742,34 di tahun 2024. Namun pada tahun 2025, nilai KLA Kota Bekasi turun menjadi 501 sehingga masuk dalam kategori “Pratama”. Artinya Kota Bekasi belum memenuhi banyak indikator pemenuhan hak anak, terutama di sektor pemenuhan administrasi.

Upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan, Kota Bekasi perlu lebih melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga lainnya. Fokusnya adalah pada pemenuhan hak anak termasuk hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga yang layak, pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus dari kekerasan atau eksploitasi melalui kebijakan, program, dan layanan yang responsif kepada kebutuhan anak.

8. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kota Bekasi tahun 2025 sebesar Rp52.513.718,- artinya nilai rata-rata output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk Kota Bekasi senilai 52,51 juta rupiah. Angka ini didapat dari total PDRB Kota Bekasi dibagi jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2025, angka ini naik dari besaran PDRB per Kapita Kota Bekasi pada tahun 2024 yang sebesar 48,92 juta rupiah.

Secara umum, peningkatan kinerja tersebut dapat lebih ditingkatkan dengan: melakukan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa; peningkatan kapasitas dan daya saing usaha, perbaikan kualitas produk, peningkatan kompetensi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar; peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja melalui fasilitasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kompetensi dan perluasan akses kerja, turut mendorong terserapnya tenaga kerja secara lebih optimal; dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IKP Kota Bekasi ini bahkan berada pada peringkat kedua secara Nasional dengan nilai 93,90 poin setelah Kota Denpasar. Namun pada tahun 2025, IKP Kota Bekasi turun secara signifikan menjadi 73,07 poin. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya perbedaan rumus penghitungan nilai IKP yang dilakukan sebelumnya dengan tahun 2025.

Upaya untuk meningkatkan IKP Kota Bekasi ke depan dapat dilakukan melalui program-program peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, dan aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas menunjukkan keberhasilan. Selain itu, upaya dalam memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi pangan juga memainkan peran penting dalam meningkatnya IKP.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kualitas dan taraf hidup masyarakat Kota Bekasi dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja indikator TPT Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 104.56 persen dari target 7.68 persen dan terealisasi 7.33 persen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi TPT, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Pengangguran Kota Bekasi tahun 2025 masih didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan dengan masing-masing sebesar 23.384 orang dan 39.272 orang.

Dalam upaya menurunkan TPT di Kota Bekasi yang masih tinggi, Pemerintah Kota Bekasi berupaya melakukan berbagai langkah seperti: a) peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri dan bersertifikasi; b) penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM untuk mendorong penyerapan tenaga kerja mandiri dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal tertentu; c) perluasan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal; dan d) optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui layanan informasi pasar kerja melalui *job fair*.

11. Tingkat Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi cenderung berkorelasi positif dengan kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dicapai. Maksudnya yaitu, jika LPE Kota Bekasi menunjukkan peningkatan maka angka kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan LPE melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial.

Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,69 persen. Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 3.96 persen. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 4,01 persen. Meskipun mengalami penurunan persentase, secara jumlah penduduk miskin Kota Bekasi mengalami peningkatan dari 128,84 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 129,54 ribu jiwa di tahun 2025. Mencermati hal ini, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan langkah-langkah lanjutan dengan melakukan pemetaan per kecamatan bahkan hingga ke level terendah agar intervensi penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Selain itu, penanganan lintas urusan juga

perlu dikedepankan agar penanganan kemiskinan lebih komprehensif serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rumah tangga serta perbaikan pendapatan masyarakat secara bertahap.

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi cenderung stabil dan positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2025 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 101,32 persen dari target sebesar 5,32 persen dan terealisasi 5,39 persen. Beberapa sektor dengan pertumbuhan relatif tinggi pada 2025 antara lain Informasi dan Komunikasi (8,37 persen), Jasa Perusahaan (8,46 persen), Real Estate (7,84 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (9,68 persen). Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi yang semakin bertumpu pada sektor jasa dan aktivitas berbasis mobilitas serta teknologi.

Meskipun LPE Kota Bekasi mengalami fluktuasi namun kota ini berada dalam posisi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi antarkota menunjukkan pentingnya faktor-faktor lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi juga sejalan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi antara kebijakan pemerintah di tingkat lokal, provinsi, dan Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

13. Rasio Gini

Target pencapaian Rasio Gini Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah 0,408 poin, sementara realisasinya 0,407 poin sehingga capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,25 persen. Ada beberapa penyebab masih tingginya angka Rasio Gini Kota Bekasi, antara lain disebabkan karena: masih tingginya angka kemiskinan yaitu 3,96 persen dari total jumlah penduduk sehingga membuat kesenjangan sosial terasa; masih rendahnya angka pertumbuhan nilai investasi yaitu sebesar Rp11.570.572.556.968,- atau sebesar - 7,17 persen dari target yang ditetapkan di awal tahun 2025; masih rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yaitu sebesar Rp2.827.217,- per bulan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat tidak terlalu tinggi; sementara TPT serta persentase Laju Inflasi sudah berada di angka yang baik sehingga tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap capaian Rasio Gini Kota Bekasi.

Secara umum, intervensi Pemerintah Kota Bekasi untuk mengurangi Rasio Gini perlu difokuskan pada peningkatan pendapatan kelompok bawah dan menengah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi lokal sehingga kesenjangan pendapatan dapat ditekan secara bertahap. Hal ini penting mengingat pengurangan ketimpangan pendapatan merupakan tujuan penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bekasi tahun 2024 mencapai skor 4,18 menurun menjadi 4,09 di tahun 2025. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, IDSD Kota Bekasi ini tertinggi keempat setelah Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bogor. Sedangkan dalam konteks kota di sekitar Jakarta,

IDSD Kota Bekasi pada tahun 2025 merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi perlu meningkatkan kembali aspek daya saingnya, terutama pada kondisi ekonomi yang dinamis, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan investasi.
Persaingan antara kota-kota di sekitar Jakarta dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi dapat dikatakan cukup seimbang, dilihat dari skor pencapaiannya yang tidak terlampau jauh. Masing-masing kota memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam memperkuat daya saingnya. Tantangan dalam peningkatan daya saing daerah Kota Bekasi yaitu terkait dengan dinamisme bisnis. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Hal ini penting karena capaian nilai dinamisme bisnis di Kota Bekasi paling rendah dibandingkan dengan pilar-pilar lain yang membentuk IDSD.

15. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni Kota Bekasi tahun 2025 capaiannya belum dapat diukur. Nilai Indeks Harmoni yang tinggi menunjukkan kondusifitas yang baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan kerukunan/keberagaman. Sebaliknya, nilai yang rendah dapat menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi konflik. Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain penguatan pendidikan toleransi dan moderasi beragama, dialog lintas agama dan budaya, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif, serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB).

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Bekasi pada tahun 2025 mencapai 89,28 poin, meningkat jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 83,46 poin. Dengan capaian tersebut, Kota Bekasi masuk dalam kategori “Sangat Baik”, yang menandakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
Meskipun capaian Indeks RB sudah sangat baik, pada Pelaksanaan Kebijakan RB masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama terkait pembangunan zona integritas, pembangunan statistik, implementasi kebijakan arsitektur SPBE, serta peningkatan Tingkat Maturitas SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar 88,83 poin, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 88,02 poin. Dari nilai IKM 101 unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (32 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan, 4 RSUD Kelas D, dan 53 Puskesmas) sebesar 88.83 poin tersebut masuk dalam kategori mutu pelayanan “A” (Sangat Baik). Unit penyelenggara pelayanan yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Puskesmas Seroja yaitu sebesar 98.47 poin, sedangkan nilai IKM terendah adalah Puskesmas Jakasetia yaitu sebesar 75.90 poin.
Berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 101 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan, unsur biaya/tarif, dan unsur sistem, mekanisme dan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat baik.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Bekasi berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Nilai AKIP Kota Bekasi pada tahun 2025 masuk dalam kategori B dengan capaian 100,22 persen dari target sebesar 67.83 poin dan terealisasi sebesar 67.98 poin. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 67,33 poin. Dari 44 Perangkat Daerah, sebanyak 13 Perangkat Daerah sudah masuk berpredikat A, sebanyak 25 Perangkat Daerah berpredikat BB, dan 6 Perangkat Daerah berpredikat B.

Tren positif Nilai SAKIP Kota Bekasi perlu ditingkatkan agar naik ke kategori BB atau A. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas (bukan hanya capaian angka), penguatan integrasi sistem perencanaan–penganggaran–pelaporan, dan pembinaan spesifik pada Perangkat Daerah yang masih lemah.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun anggaran 2024 Tahun Ukur 2025, Kota Bekasi berhasil meraih skor sebesar 66,7524 dengan predikat "Cukup Baik", namun secara kategorisasi performa nasional, Kota Bekasi mendapat nilai “C” dengan peringkat "Perlu Perbaikan". Meskipun menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan prosedur, skor tersebut mengindikasikan adanya deviasi antara realisasi kinerja dengan target standar nasional (ideal di atas 75,00), sehingga diperlukan langkah-langkah korektif yang lebih masif pada dimensi yang memiliki gap nilai cukup lebar terutama pada dimensi pelaksaan anggaran dan dimensi pemenuhan belanja wajib.

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja dan realisasi nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kota Bekasi Tahun 2025, belum dapat ditentukan karena belum ada nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Nilai EPPD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 3,17, masuk dalam kategori “Sedang”.

Untuk ke depannya, Kota Bekasi perlu meningkatkan capaian EPPD diantaranya melalui: integrasi sistem informasi yaitu mengintegrasikan EPPD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) untuk menjamin transparansi dan konsistensi data; penguatan data dukung dengan memastikan laporan EPPD didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, supervisi, dan pelatihan intensif bagi tim daerah yang menyusun LPPD agar memenuhi standar kinerja; dan sinkronisasi perencanaan dengan menyelaraskan hasil evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Capaian Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 107.50 persen, dari target 2.80 terealisasi 3.01. Capaian ini masuk dalam Level 3 (Terdefinisi), artinya proses pengendalian telah terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten.

Capaian ini tentunya masih dapat ditingkatkan dan terutama perlu memperkuat manajemen risiko pembangunan agar pendekatan yang dilakukan lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mengarahkan serta mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan, Selain itu, manajemen risiko ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan proyek, proaktif terhadap perubahan, serta mencakup manajemen risiko internal dan lintas instansi untuk memitigasi berbagai potensi hambatan.

22. Indeks Kota Cerdas

Indeks Kota Cerdas Kota Bekasi berhasil meraih posisi membanggakan dalam evaluasi Kota Cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI di tahun 2024. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai skor 3,60 pada (skala 1-4) pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Indeks Kota Cerdas Kota Bekasi meningkat menjadi 3.67 yang perhitungannya dilakukan secara mandiri.

Ke depannya, upaya peningkatan nilai Indeks Kota Cerdas Kota Bekasi masih tetap diperlukan terutama pada sisi peningkatan kualitas hidup (*Smart Living*) diantaranya dengan peningkatan persentase balita dengan imunisasi lengkap serta cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di Kota Bekasi. Pada sisi dimensi *Smart Society* diperlukan peningkatan terhadap pengembangan aplikasi pendukung *Smart City* serta peningkatan pada pengembangan literasi *Smart City*.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2026 TRIWULAN II

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Bekasi Tahun 2026 Triwulan I juga masih belum dapat dihitung karena levelnya pada *ultimate outcome*. Sebagai gambaran ketercapaiannya, capaian IKD yang digunakan yaitu tahun 2025.

Secara keseluruhan, kinerja IKD pada Aspek Geografi dan Demografi rata-rata capaiannya pada kategori sangat tinggi. Meski demikian, terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi dalam kurun waktu 2021-2024 terakhir masuk dalam kategori rendah, bahkan di tahun 2024, angkanya hanya 2,04 persen, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6 persen. Namun pada tahun 2025, angkanya meningkat menjadi 5,05 persen. Maknanya adalah terdapat 5 dari

setiap 100 orang yang tidak mendapatkan cukup kalori dari makanan setiap harinya untuk menjalankan aktivitas normal dan hidup sehat.
Pada indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, realisasinya masih dibawah target namun masih dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 ini meningkat. Penambahan akses masyarakat ini, di antaranya karena kinerja layanan dari Perumda Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi yang meningkat melalui integrasi layanan kawasan perumahan besar, serta optimalisasi wilayah pelayanan eksisting. Hal ini juga sejalan dengan kapasitas produksi, yang meningkat dari 850 liter per detik menjadi 2.800 liter per detik.

Sementara pada indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi menunjukkan penurunan yang signifikan. Jika pada tahun 2024 masuk dalam kategori “sedang” menjadi kategori "rendah" di tahun 2025. Meski demikian, jika dicermati per bencana, risiko bencana yang cukup besar yaitu terkait bencana banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Sebagai salah satu kota di sekitar Jakarta, penurunan IRB Kota Bekasi memiliki dampak yang penting dalam konteks mitigasi risiko bencana regional. Dengan menurunnya IRB, Kota Bekasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bencana alam yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, Kota Bekasi masih memerlukan upaya-upaya lanjutan dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan sistem peringatan dini, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.
Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebagian indikator yang digunakan sama dengan indikator pada IKU Kota Bekasi yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Indikator tersebut seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Stunting, dan Indeks Ketimpangan Gender.
Secara keseluruhan, indikator yang terkait dengan kesehatan rata-rata menunjukkan kinerja yang baik. Indikator Usia Harapan Hidup kriteria capaiannya pada kategori sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap kesehatan sudah baik. Hal ini juga sejalan dengan prioritas Kota Bekasi yang dalam beberapa tahun terakhir berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui penambahan fasilitas dan perbaikan layanan. Sementara pada indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional realisasinya sudah lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses jaminan kesehatan sudah sangat luas, (*Universal Health Coverage*) sudah tercapai.
Namun demikian, terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian serius mengingat kriteria capaiannya yang sangat rendah. Indikator tersebut yaitu Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun. Realisasi indikator ini jauh dari yang ditargetkan yaitu nol. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun sebanyak 24 kasus turun menjadi 15 kasus di tahun 2025. Untuk itu, diperlukan upaya lanjutan dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan masa nifas bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan apabila terdapat komplikasi, serta pelayanan KB.

Untuk kinerja terkait kualitas pendidikan, skor literasi dan numerasi SD/SMP Kota Bekasi secara umum dalam kategori sangat tinggi, terutama di jenjang SMP. Namun terdapat kelemahan mendasar pada numerasi SD. Jika hal ini tidak ditangani, akan berdampak pada kualitas pendidikan Kota Bekasi dalam jangka Panjang. Numerasi SD adalah fondasi semua jenjang berikutnya yang akan berdampak ke SMP/SMA jika tidak diperbaiki. Untuk itu, perlu adanya program “back to basic” (calistung), fokus intervensi kelas rendah (kelas 1–3), monitoring berbasis sekolah, pelatihan guru matematika SD, metode pembelajaran kontekstual, penguatan numerasi dalam semua mata pelajaran, dan replikasi keberhasilan pada jenjang SMP ke SD.

Sementara, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang realisasinya tahun 2025 (9,41) menurun signifikan jika dibandingkan tahun 2024 (59,36). Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, namun terjadi di banyak kabupaten/kota yang lain. Faktor yang menyebabkan penurunan lebih dikarenakan adanya perubahan penilaiannya. Data IPLM Kota Bekasi tahun 2025 mencakup indikator perpustakaan dan penyebaran informasi, dengan skor pendukung lainnya yang tercatat sebesar 0,1500 dan 0,1310. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan IPLM seperti dengan mengoptimalkan perpustakaan digital, penguatan sarana prasarana perpustakaan, peningkatan budaya baca dan literasi, dan peningkatan kualitas pustakawan.

Perbaikan kualitas pendidikan juga sejalan perbaikan pada akses masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang kriteria capaiannya pada kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tentunya sejalan dengan prioritas Kota Bekasi yang dalam beberapa tahun terakhir yang berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui penambahan sekolah terutama pada jenjang SMP serta pemerataan guru.

Dari sisi pembangunan keluarga yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Bekasi menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target. Hal ini mengindikasikan peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Ke depan, fokus intervensi perlu diarahkan pada pemerataan antarwilayah, penguatan ekonomi keluarga, dan keberlanjutan program yang telah berhasil dilaksanakan. Sementara pada sisi pembangunan gender, Indeks Pembangunan Gender di Kota Bekasi sangat baik dan telah melampaui target. Ini menunjukkan kesetaraan gender yang semakin kuat. Namun, ke depan fokus perlu diarahkan pada kualitas partisipasi perempuan, penguatan peran ekonomi dan kepemimpinan, serta pengurangan gap yang bersifat struktural.

Pada Aspek Daya Saing Daerah, beberapa indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan Inovasi Daerah yang kriteria kinerjanya sangat tinggi tidak serta merta mendukung (menaikkan) nilai investasi yang masuk ke Kota Bekasi pada tahun 2025. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) tahun 2024 mencapai Rp13,7 triliun turun menjadi Rp11,57 triliun di tahun 2025. Kondisi ini menandakan bahwa daya tarik investasi di Kota Bekasi melemah. Terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan pelemahan tersebut seperti investor menahan ekspansi, perpindahan investasi ke daerah lain, perizinan belum cukup cepat/efisien, ketersediaan lahan terbatas, infrastruktur pendukung belum optimal, ketidakpastian ekonomi makro, dan UMK yang tinggi. Jika tren ini berlanjut maka pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dapat

melambat, penyerapan tenaga kerja terganggu, dan PAD berpotensi menurun. Untuk itu diperlukan langkah cepat dalam perbaikan iklim investasi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan lahan dan insentif.
Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan sinyal positif (investasi tetap bergerak). Tapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan ekonomi. PMTB naik artinya aktivitas investasi fisik (bangunan, mesin, infrastruktur) meningkat. Hal ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha masih terjaga. Walau nilai investasi turun (indikator sebelumnya), PMTB justru naik, artinya investasi yang terjadi lebih banyak pada penguatan aset eksisting, bukan ekspansi besar-besaran.
Dari sisi kinerja ekspor Kota Bekasi sangat kuat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Lonjakan signifikan (+272 juta USD) mencerminkan permintaan pasar ekspor kuat. Produk Kota Bekasi kompetitif di pasar global. Ini mengindikasikan ekspor ditopang sektor unggulan (kemungkinan industri/manufaktur) dan ada peluang diversifikasi pasar serta produk. Untuk itu, ekspor Kota Bekasi perlu dijaga agar berkelanjutan, tidak hanya momentum sesaat. Perluasan pasar ekspor (tidak bergantung negara tertentu), hilirisasi dan nilai tambah produk, dan pelibatan UMKM ekspor sangat penting untuk ditingkatkan.
Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bekasi relatif stabil namun cenderung menurun dari 65,58 persen tahun 2024 menjadi 64,10 persen di tahun 2025. Ini menunjukkan sebagian penduduk usia kerja belum/tidak aktif di pasar kerja. Ada indikasi adanya penurunan pada minat/akses kerja, bertambahnya kelompok tidak bekerja dan tidak mencari kerja (misalnya pelajar dan ibu rumah tangga). TPAK pada dasarnya tidak hanya soal lapangan kerja, tapi juga akses dan kesiapan tenaga kerja kondisi sosial (pendidikan, gender, dan lainnya), perluasan kesempatan kerja (padat karya dan sektor jasa/digital), pelatihan dan *reskilling* tenaga kerja, serta partisipasi perempuan dan pemuda.
Mencermati kondisi di atas, Kota Bekasi perlu mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Hal ini tentunya mempertimbangkan tren kontribusi industri pengolahan yang dalam kurun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan kontribusi industri pengolahan biasanya dipicu oleh keterbatasan lahan dan biaya tinggi (sewa/tenaga kerja/logistik), relokasi industri ke wilayah yang lebih murah, otomatisasi (output naik, serapan tenaga kerja tidak). Penurunan industri pengolahan bukan hanya masalah, tapi tanda perubahan ekonomi. Kota Bekasi harus *shift* dari *economy of scale* ke *economy of creativity & innovation.*.
Jika tidak melakukan perubahan, Kota Bekasi bisa “terjebak” sebagai kota penyangga tanpa keunggulan baru. Ekonomi kreatif dan digital lebih “ringan” tapi tumbuh cepat. Kota Bekasi punya modal kuat yaitu kedekatan dengan Jakarta (pasar dan ekosistem), demografi muda dan melek digital, dan basis UMKM besar. Selain itu, Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencerminkan ukuran tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Bekasi yang sudah pada angka maksimal (5). Untuk itu, transformasi ekonomi Kota Bekasi menjadi keniscayaan. Penguatan ekonomi kreatif dan digital adalah strategi adaptif terhadap penurunan industri pengolahan. Ke depan, fokus pada ekosistem kreatif, talenta digital, dan UMKM berbasis teknologi. Tujuannya tentu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi meskipun struktur berubah.

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan digital, tentunya diperlukan akses permodalan. Salah satu indikator yang menunjukkan akses permodalan yaitu Indeks Inklusi Keuangan Daerah, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa besar masyarakat di suatu daerah memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan formal. Tujuannya untuk mendorong pemerataan akses keuangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan mendorong UMKM berkembang (akses kredit). Indeks Inklusi Keuangan Daerah Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 52,01. Artinya akses dan penggunaan layanan keuangan formal belum merata. Masih banyak masyarakat belum punya rekening, belum akses kredit formal, dan masih bergantung pada sektor informal.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah untuk mendukung inklusi keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang perbankan syariah. Sementara dari sisi masyarakat, telah terdapat wadah organisasi (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang juga berupaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi pengembangan ekonomi syariah di Kota Bekasi masih cukup besar. Hal ini juga diindikasikan dengan indikator Indeks Zakat yang sebesar 0,35. Artinya pengelolaan zakat di Kota Bekasi masih dalam kategori berkembang.

Pada Aspek Pelayanan Umum, rata-rata kriteria capaiannya sudah sangat tinggi. Meskipun capaian Indeks RB sudah sangat baik, pada Pelaksanaan Kebijakan RB masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama terkait pembangunan zona integritas, pembangunan statistik, implementasi kebijakan arsitektur SPBE, serta peningkatan Tingkat Maturitas SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP.

Pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), capaian Kota Bekasi tahun 2025 meningkat signifikan jika dibanding tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pemerintahan berjalan baik dan meningkat. Layanan publik berbasis elektronik semakin efektif dan terintegrasi. Namun demikian tetap perlu dilakukan upaya penguatan tata kelola digital, integrasi aplikasi antar perangkat daerah, penguatan satu data dan keamanan informasi, peningkatan layanan digital *end-to-end* (tanpa tatap muka), dan penguatan SDM digital ASN.

Adapun untuk Indeks Kepausan Masyarakat, berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 101 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan, unsur biaya/tarif, dan unsur sistem, mekanisme dan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat baik.

Selain empat aspek yang sudah diuraikan diatas, terdapat IKK yang merupakan bagian dari IKD. IKK yang diuraikan di bawah ini didasarkan pada IKK yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

A. Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan ini, rata-rata kriteria capaian kinerjanya sudah sangat tinggi. Tantangan utama ada pada pendidikan nonformal, kualitas sarana, dan mutu sekolah swasta.

Fokus ke depan perlu pemerataan kualitas dan inklusivitas pendidikan. Untuk itu diperlukan perluasan PAUD dan pendidikan kesetaraan, peningkatan sarana prasarana sekolah, pembinaan mutu sekolah swasta, dan intervensi anak putus sekolah.

B. Urusan Kesehatan

Layanan kesehatan di Kota Bekasi secara keseluruhan sudah sangat baik tapi belum didukung oleh sarana prasarana memadai dan ketersediaan SDM yang cukup. Ada gap antara kualitas layanan dan kapasitas sistem. Untuk itu diperlukan intervensi pada upaya pemenuhan SDM kesehatan, peningkatan sarana dan alat kesehatan Puskesmas, rehabilitasi gedung layanan kesehatan, dan penguatan sistem pendukung layanan. Penguatan ini merupakan prasyarat utama untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang relatif baik dan stabil, terutama pada infrastruktur jalan, drainase, sanitasi dan penegakan tata ruang. Namun masih ada kelemahan pada infrastruktur air minum dan bangunan gedung. Untuk ke depan perlu penguatan infrastruktur dasar yang berdampak langsung ke kualitas hidup. Prioritas penanganannya yaitu peningkatan akses air minum perpipaan, penataan dan pengawasan kualitas bangunan, percepatan dokumen teknis (PBG/SLF), dan optimalisasi RTH dan kualitas ruang kota.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dari sisi perlindungan sosial (rumah layak huni bagi korban bencana, relokasi warga terdampak program kota, dan ketersediaan rumah layak huni terjangkau) sudah sangat baik. Namun, peningkatan kualitas permukiman masih menjadi tantangan utama.

Terdapat gap antara penyediaan rumah dengan kualitas lingkungan hunian. Untuk itu diperlukan penataan kawasan permukiman secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan seperti percepatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan PSU permukiman, integrasi program perumahan dan permukiman, dan penataan kawasan berbasis tata ruang.

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat Kota Bekasi sudah sangat optimal. Namun masih terdapat tantangan pada kapasitas sarana prasarana dan keberlanjutan sistem layanan. Ke depan perlu fokus pada memperkuat kapasitas dan sistem agar tetap tangguh menghadapi risiko perkotaan. Intervensi yang dapat dilakukan seperti penguatan sarana prasarana (penambahan armada damkar, modernisasi alat proteksi dan penyelamatan), penguatan sistem pencegahan (edukasi masyarakat, deteksi dini kebakaran dan bencana), digitalisasi layanan darurat (*command center* terintegrasi dan sistem pelaporan cepat berbasis aplikasi), peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi multipihak.

F. Urusan Sosial

Kinerja urusan sosial secara umum sudah baik yang mana hal ini menunjukkan layanan sosial sangat optimal dan responsif, kelompok rentan terlayani secara menyeluruh, dan sistem penanganan sosial berjalan efektif. Namun tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan dampak layanan dan mengurangi ketergantungan bantuan. Untuk itu diperlukan fokus penanganan pada transformasi dari layanan bantuan menuju pemberdayaan sosial berkelanjutan melalui penguatan data sosial terpadu, pendalaman intervensi kelompok rentan, dan penguatan peran PSKS.

G. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja secara umum sudah baik dengan peningkatan signifikan pada pelatihan dan tata kelola kerja. Namun terdapat tantangan utama pada ketidakseimbangan antara pelatihan dan penyerapan kerja serta perencanaan tenaga kerja yang belum optimal.

Ke depan perlu adanya sinkronisasi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, kerja sama langsung dengan industri, *job matching, job fair digital*, penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja.

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum sudah baik, terutama dari sisi kebijakan, data, dan layanan. Namun masih terdapat tantangan pada perlindungan anak rentan dan kualitas implementasi kelembagaan. Untuk itu, ke depan perlu peningkatan kualitas layanan dan perlindungan yang lebih tepat sasaran. Upaya yang dapat dilakukan seperti intervensi pada anak rentan (*by name by address* dan pendampingan intensif), mendorong PUSPAGA lebih aktif (konseling dan edukasi keluarga), forum anak diberdayakan (bukan hanya formalitas), optimalisasi data gender dan anak, pencegahan kekerasan dan TPPO (edukasi masyarakat, sistem pelaporan cepat, dan perlindungan korban), dan memastikan anggaran untuk program prioritas gender dan anak.

I. Urusan Pangan

Kinerja urusan pangan Kota Bekasi sudah sangat baik dan menunjukkan perbaikan signifikan yang ditandai dengan pola konsumsi membaik, keamanan pangan tinggi, dan kerawanan pangan menurun. Fokus ke depan perlu untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan terhadap risiko eksternal. Upaya yang dapat dilakukan seperti penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan (monitoring wilayah rawan pangan dan intervensi cepat berbasis data), diversifikasi sumber pangan (*urban farming* pangan lokal alternatif), penguatan distribusi dan stabilitas harga (kerja sama antar daerah pengendalian inflasi pangan), dan edukasi pola konsumsi sehat (kampanye gizi seimbang kurangi konsumsi pangan tidak sehat).

J. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan Kota Bekasi sangat baik, terutama dalam penyelesaian konflik dan pengadaan tanah. Namun masih terdapat tantangan pada kepastian hukum lahan dan potensi konflik berulang. Ke depan perlu fokus pada pencegahan konflik dan percepatan sertifikasi tanah. Upaya yang dapat dilakukan seperti percepatan sertifikasi tanah (kolaborasi dengan BPN dan program sertifikasi massal), penguatan mediasi dan

pencegahan konflik (sistem deteksi dini konflik lahan dan pendekatan partisipatif masyarakat), dan percepatan pengadaan tanah (penyederhanaan proses ganti rugi serta kepastian nilai dan transparansi).

K. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja lingkungan hidup Kota Bekasi sudah baik, terutama pada kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat. Namun terdapat kelemahan serius pada aspek pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah dan sampah. Untuk itu perlu penguatan pengawasan dan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan seperti penguatan pengawasan lingkungan (inspeksi rutin usaha, penegakan hukum lingkungan, dan digital monitoring), pengelolaan limbah B3 (wajib TPS B3 untuk usaha, pendampingan dan pengawasan ketat), optimalisasi sistem persampahan (peningkatan armada angkut, modernisasi TPA/TPS, dan penguatan sistem 3R), dan penguatan kolaborasi masyarakat (kampung iklim diperluas dan edukasi lingkungan berkelanjutan).

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bekasi sangat baik, terutama pada kepemilikan dokumen dasar penduduk. Tantangan ke depan adalah optimalisasi pemanfaatan data dan menjaga kualitas serta validitas data.

Untuk itu perlu menjadikan data kependudukan sebagai fondasi utama perencanaan dan pelayanan publik. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan satu data kependudukan (integrasi data antar OPD dan sinkronisasi real-time), optimalisasi pemanfaatan data (untuk bantuan sosial dan perencanaan pembangunan), digitalisasi layanan adminduk (layanan online *end-to-end* dan integrasi dengan aplikasi daerah), dan peningkatan kualitas data (*update* berkala dan validasi data lapangan).

M. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB Kota Bekasi sudah sangat baik dan terkendali. Hal ini ditandai dengan keberhasilan program KB, penurunan fertilitas, dan peningkatan layanan sosial keluarga. Ke depan perlu fokus pada kualitas layanan (terutama lansia) dan keberlanjutan program. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas layanan (pendampingan lansia berbasis kebutuhan dan monitoring kualitas layanan KB), inovasi program KB (edukasi digital dan pendekatan generasi muda), penguatan ketahanan keluarga (program parenting serta edukasi keluarga sehat dan sejahtera), dan pendekatan berbasis data (identifikasi kelompok risiko tinggi dan intervensi *by name by address*).

N. Urusan Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan Kota Bekasi sangat baik, terutama pada penyediaan infrastruktur dan pengendalian pelanggaran. Tantangan utama ada pada pemanfaatan angkutan umum, kemacetan perkotaan, dan integrasi sistem transportasi. Untuk itu, ke depan perlu fokus pada transformasi menuju sistem transportasi terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi mendorong penggunaan angkutan umum (integrasi rute dan tarif serta peningkatan kenyamanan dan ketepatan waktu), manajemen lalu lintas (rekayasa lalu lintas dan *smart traffic system*), integrasi transportasi regional (konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya serta penguatan transportasi massal), dan edukasi serta penegakan hukum (kampanye tertib lalu lintas dan penegakan hukum konsisten).

O. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Bekasi sudah sangat baik dan stabil. Terdapat tantangan yang harus dihadapi terutama terkait risiko stagnasi dan kebutuhan integrasi dan inovasi. Fokus ke depan perlu dilakukan percepatan transformasi layanan digital yang terintegrasi dan inovatif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi Integrasi layanan digital (super apps pelayanan publik dan single sign-on), inovasi layanan (otomatisasi (ai/chatbot) dan layanan berbasis kebutuhan warga), penguatan pengelolaan pengaduan (respons lebih cepat dan analisis data pengaduan untuk kebijakan), dan peningkatan literasi digital (edukasi masyarakat dan akses layanan yang inklusif).

P. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja urusan koperasi dan UKM Kota Bekasi meningkat signifikan serta tumbuh sangat kuat dan menjadi motor ekonomi kota. Tantangannya yaitu pada peningkatan kualitas usaha, keberlanjutan, dan daya saing. Untuk itu perlu transformasi KUMK menjadi usaha yang produktif, digital, dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan kualitas KUMK (pendampingan bisnis dan peningkatan produktivitas), digitalisasi KUMK (masuk *marketplace* serta *branding* dan pemasaran digital), penguatan koperasi modern (transparansi dan tata kelola serta digital koperasi), dan akses pembiayaan (kredit KUMK dan kemitraan dengan perbankan).

Q. Urusan Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal Kota Bekasi sangat baik dari sisi sistem dan kelembagaan. Namun belum optimal dari sisi realisasi investasi. Untuk itu perlu meningkatkan investasi riil yang masuk di Kota Bekasi.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan realisasi investasi (pendampingan investor dan percepatan implementasi proyek), peningkatan daya tarik investasi (penyediaan lahan siap investasi dan kepastian tata ruang), promosi lebih terarah (fokus sektor unggulan dan target investor spesifik), dan integrasi dengan ekonomi lokal (link investasi dengan UMKM dan tenaga kerja serta hilirisasi sektor unggulan).

R. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kota Bekasi sudah tercapai sesuai target. Namun masih menghadapi tantangan pada rendahnya partisipasi dan kewirausahaan pemuda dan aktivitas olahraga yang belum berkembang optimal. Fokus ke depan perlu untuk meningkatkan peran aktif dan produktivitas pemuda melalui penguatan kewirausahaan pemuda (inkubasi bisnis pemuda dan akses pembiayaan serta mentoring), peningkatan partisipasi pemuda (aktivasi komunitas pemuda serta program kreatif dan digital), pengembangan olahraga prestasi dan partisipatif (penambahan event olahraga dan pembinaan atlet berkelanjutan), dan penyediaan ruang ekspresi pemuda (*creative hub* serta event kreatif dan olahraga).

S. Urusan Statistik dan Urusan Persandian

Kinerja urusan statistik dan urusan persandian Kota Bekasi sangat baik dan sudah berada pada level matang. Namun tantangan ke depan terkait dengan pemanfaatan data secara optimal, integrasi sistem, dan antisipasi ancaman siber. Ke depan perlu transformasi dari “data tersedia” menjadi “data sebagai penggerak kebijakan”. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan data (data untuk perencanaan dan evaluasi serta dashboard kinerja daerah), integrasi satu data daerah, interoperabilitas antar OPD, dan satu portal data terpadu), penguatan keamanan siber (audit

keamanan berkala dan peningkatan kapasitas SDM), dan pengembangan analitik data (big data & AI untuk kebijakan serta prediksi dan perencanaan berbasis data).

T. Urusan Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan Kota Bekasi tercapai sesuai target, namun masih bersifat stagnan dan terbatas. Tantangan utamanya yaitu skala pelestarian dan pemanfaatan budaya sebagai potensi ekonomi. Ke depan perlu fokus pada pengembangan budaya menjadi aset ekonomi dan identitas kota.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi perluasan dan pendataan cagar budaya (inventarisasi situs baru dan penetapan kawasan budaya), pengembangan kesenian tradisional (pembinaan komunitas seni dan regenerasi pelaku budaya), integrasi dengan ekonomi kreatif dan pariwisata (event budaya serta festival dan promosi digital), dan digitalisasi budaya (arsip digital dan promosi melalui media sosial).

U. Urusan Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun kualitas literasi masih sangat rendah. Terdapat gap antara akses dan minat membaca serta kemampuan literasi yang sesungguhnya. Ke depan perlu peningkatan kualitas literasi, bukan hanya fasilitas. Upaya yang dapat dilakukan meliputi transformasi perpustakaan (dari tempat baca menjadi pusat aktivitas literasi serta ruang kreatif, diskusi, komunitas), penguatan program literasi (gerakan membaca aktif serta literasi digital dan informasi), digitalisasi layanan perpustakaan (e-library dan akses buku digital), dan kolaborasi dengan sekolah serta komunitas (program literasi berbasis komunitas dan kegiatan literasi rutin).

V. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan Kota Bekasi masih rendah dan menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini berpotensi mengganggu akuntabilitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Ke depan perlu transformasi kearsipan menjadi sistem digital yang tertib, terintegrasi, dan strategis. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan tata kelola kearsipan (standarisasi pengelolaan arsip di OPD serta monitoring dan evaluasi rutin), digitalisasi arsip (e-arsip terintegrasi dan sistem manajemen arsip elektronik), peningkatan kapasitas SDM (pelatihan arsiparis dan penempatan tenaga khusus), dan integrasi dengan SPBE dan Satu Data.

W. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja urusan perikanan Kota Bekasi stabil dan tercapai sesuai target. Namun belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. ke depan perlu peningkatan produktivitas dan nilai tambah (hilirisasi). Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan produktivitas (teknologi budidaya intensif dan urban aquaculture), penguatan hilirisasi (branding dan pemasaran), dukungan UMKM perikanan (pelatihan dan akses pembiayaan), dan integrasi dengan ekonomi lokal.

X. Urusan Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata Kota Bekasi sudah tercapai sesuai target. Namun masih bersifat stabil, skala terbatas, dan belum berdampak besar secara ekonomi. Ke depan perlu fokus pada peningkatan daya tarik, promosi, dan integrasi dengan ekonomi kreatif.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan branding pariwisata (*city branding* Kota Bekasi serta promosi digital dan event), integrasi pariwisata dan ekonomi kreatif (festival, event budaya dan kuliner serta kolaborasi

UMKM kreatif), pengembangan destinasi tematik (wisata urban, wisata kuliner, dan wisata komunitas), dan peningkatan daya tarik wisata.

Y. Urusan Pertanian

Urusan pertanian Kota Bekasi menunjukkan kinerja beragam dengan kekuatan pada peternakan. Namun terdapat kelemahan pada produksi tanaman pangan.

Ke depan perlu fokus pada adaptasi pertanian perkotaan dan penguatan sub sektor unggulan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengembangan pertanian perkotaan (urban farming serta hidroponik dan vertikultur), penguatan sub sektor peternakan (skala usaha dan hilirisasi produk), peningkatan produktivitas hortikultura (teknologi pertanian dan intensifikasi lahan), dan ketahanan pangan kota (kerja sama antar daerah dan diversifikasi pangan).

Z. Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian

Kinerja urusan perdagangan dan urusan perindustrian Kota Bekasi secara umum baik, terutama pada ekspor dan tertib niaga. Namun terdapat tantangan utama pada pengendalian inflasi. Ke depan perlu fokus pada menjaga stabilitas harga tanpa mengganggu pertumbuhan perdagangan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengendalian inflasi pangan (operasi pasar, kerja sama antar daerah, dan penguatan distribusi), penguatan rantai pasok (sistem logistik pangan dan ketersediaan stok), peningkatan daya saing IKM (digitalisasi serta akses pasar dan ekspor), dan penguatan perdagangan ekspor (diversifikasi pasar dan hilirisasi produk).

CAPAIAN KINERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN

A. PRIORITAS KOTA BEKASI

Program prioritas Kota Bekasi diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Pada tahun 2026, alokasi anggaran terbesar terdapat pada Tujuan 5: Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas Disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif, dengan alokasi anggaran sebesar 68,90 persen yang terdiri atas 14 program. Kemudian Tujuan 1: Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari, sebesar 20,94 persen yang terdiri atas 12 program. Tujuan 2: Terwujudnya Daya Saing SDM Kota Bekasi yang Berbudaya, Humanis dan Harmonis, sebesar 7,77 persen yang terdiri atas 14 program, Tujuan 4: Terwujudnya Iklim Investasi Kota Bekasi yang Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi sebesar 2,24 persen yang terdiri atas 7 program. Sementara alokasi anggaran yang terkecil terdapat pada Tujuan 3: Terwujudnya Struktur Ekonomi Kota Bekasi yang Tangguh dan Inklusif, sebesar 0,15 persen yang terdiri atas 8 program.

Rencana Program Prioritas Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026 difokuskan pada penguatan infrastruktur kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta reformasi tata kelola pemerintahan berbasis kota cerdas. Keseluruhan program disusun untuk mendukung visi pembangunan melalui lima prioritas utama pembangunan daerah yang sejalan dengan Gerakan Kobe Hijau, Kobe Cerdas, Kobe Sehat, Kobe Berkarya, Kobe Menarik, Kobe Bersinergi, Dan Kobe Berkinerja.

Pada aspek pembangunan wilayah dan lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi memprioritaskan pembangunan infrastruktur modern dan berkelanjutan

melalui program penataan ruang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, hingga pengendalian lingkungan hidup. Pendanaan terbesar pada sektor ini diarahkan pada Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebesar Rp.281,3 miliar, Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp.132,36 miliar, serta Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebesar Rp.60,75 miliar. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota yang lebih tertata, ramah lingkungan, serta memiliki ketahanan terhadap banjir dan perubahan iklim melalui prioritas pembangunan Kobe Hijau.

Dalam bidang pelayanan dasar, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan SDM. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan pendanaan cukup besar untuk Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp.371,67 miliar, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp.37,18 miliar, serta berbagai program kesehatan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, serta pembangunan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif melalui prioritas Kobe Cerdas dan Kobe Sehat.

Pada sektor ekonomi, strategi pembangunan diarahkan pada penguatan UMKM, perdagangan, industri, ekonomi kreatif, dan ketahanan pangan. Program-program seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan ekspor, pembangunan industri, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengawasan keamanan pangan menjadi instrumen utama dalam menciptakan ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Kota Bekasi sebagai kota jasa dan perdagangan modern.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, Pemerintah Kota Bekasi juga memprioritaskan penciptaan iklim investasi yang kompetitif melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 35,99 miliar serta penguatan pelayanan penanaman modal berbasis risiko. Kebijakan ini didukung dengan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kerja sama daerah, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal. Pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara peningkatan investasi dan penguatan kualitas SDM daerah.

Sementara itu, pada aspek tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Bekasi mengarahkan pembangunan menuju konsep *smart city* dan birokrasi modern melalui penguatan pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, inovasi daerah, serta penguatan pengawasan internal pemerintah. Pendanaan besar juga dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan sebesar Rp. 253,28 miliar dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 107,35 miliar guna memperkuat pelayanan publik hingga tingkat kewilayahan.

Secara umum, sintesa rencana program prioritas tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berupaya menyeimbangkan pembangunan fisik dan nonfisik dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing ekonomi, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Struktur pendanaan yang besar pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi

daerah mencerminkan arah pembangunan Kota Bekasi menuju kota metropolitan yang modern, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

B. PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT

Rencana program dukungan Kota Bekasi terhadap pencapaian Jabar Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2026 mengarahkan berbagai program pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian visi Jabar Istimewa melalui penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi daerah, penguatan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi pendanaan strategis yang melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian 9 prioritas pembangunan Jabar Istimewa dengan kontribusi tertinggi yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa sebesar 68 persen yang terdiri atas 7 program. Pendidikan Istimewa sebesar 10,49 persen yang terdiri atas 5 program, Infrastruktur Istimewa sebesar 7,43 persen yang terdiri atas 3 program, Kesehatan Istimewa sebesar 6,75 persen yang terdiri atas 2 program, Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa sebesar 4,49 persen yang terdiri atas 2 program, Lingkungan Hidup Istimewa sebesar 2,30 persen yang terdiri atas 2 program, Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa sebesar 0,52 persen yang terdiri atas 12 program, dan yang terkecil adalah Pertanian Istimewa sebesar 0,02 persen yang terdiri atas 2 program.

Pada sektor Infrastruktur Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi memprioritaskan pembangunan jalan, transportasi, dan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung konektivitas dan ketahanan infrastruktur kota. Program Penyelenggaraan Jalan memperoleh alokasi pendanaan terbesar sebesar Rp.281,3 miliar yang dilaksanakan oleh DBMSDA. Selain itu, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp.95,71 miliar dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp.49,92 miliar juga menjadi tanggung jawab DBMSDA. Kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah dalam mendukung infrastruktur perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi menitikberatkan pada reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh alokasi sangat besar sebesar Rp.3,85 triliun yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.33,56 miliar oleh BPKAD, Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp.10,86 miliar oleh BKPSDM, serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp.5,96 miliar oleh BAPENDA. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Pada sektor Pendidikan Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi mendukung pembangunan pendidikan berkarakter, penyediaan ruang kelas baru, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program Pengelolaan Pendidikan menjadi prioritas utama dengan alokasi sebesar Rp.595,69 miliar melalui Dinas Pendidikan. Selain itu, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.3,2 miliar dan Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp.1,92

miliar turut memperkuat peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. Dukungan sektor pendidikan juga diperkuat melalui Program Pengembangan Kebudayaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera untuk membangun karakter masyarakat yang berbudaya.

Dalam mendukung Kesehatan Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran besar untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan penguatan SDM kesehatan. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memperoleh anggaran sebesar Rp.371,67 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp.16,22 miliar. Fokus ini diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk penguatan layanan rumah sakit dan tenaga kesehatan spesialis.

Pada sektor Pertanian Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekosistem pertanian organik melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp.758 juta dan Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 150 juta yang dilaksanakan oleh DKPPP. Sementara itu, pada sektor Lingkungan Hidup Istimewa, Program Pengelolaan Persampahan memperoleh alokasi sebesar Rp.132,36 miliar oleh DLH untuk mendukung pengelolaan sampah mandiri dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dalam mendukung Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi mengarahkan program pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan *smart city*. Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 3,4 miliar dan Program Pelatihan Kerja sebesar Rp.1,2 miliar dilaksanakan oleh DISNAKER untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penguatan sektor industri dan perdagangan dilakukan melalui DISDAGPERIN dengan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp.1,6 miliar serta Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp.1,3 miliar. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, dan investasi juga didukung oleh DISPARBUD, DKUKM, dan DPMPTSP. Penguatan konsep *smart city* diwujudkan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp13,51 miliar oleh DISKOMINFO SATNDI.

Pada aspek Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa, Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan masyarakat di tingkat wilayah melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.4,7 miliar serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.253,28 miliar yang dilaksanakan oleh kecamatan. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran RT/RW, Linmas, kader PKK, kader Posyandu, dan guru agama dalam mendukung pelayanan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, sintesa program menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendukung pencapaian Jabar Istimewa melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Besarnya alokasi pendanaan pada sektor birokrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan komitmen Kota Bekasi dalam mempercepat pembangunan daerah yang modern, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

C. PRIORITAS NASIONAL

Rencana program dukungan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita, Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2026 mengarahkan berbagai program daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan ketahanan pangan, transformasi digital, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi program nasional dengan program perangkat daerah disertai alokasi pendanaan strategis dan pembagian tanggung jawab antar perangkat daerah.

Pada Program Nasional 1, dukungan diarahkan pada penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu indikatif sebesar Rp.6,91 miliar yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO STANDI. Program ini mendukung penyebaran informasi publik yang edukatif, objektif, dan mendukung transformasi komunikasi pemerintahan digital.

Dalam mendukung Program Nasional 2 terkait ketahanan pangan, air, sanitasi, ekonomi digital, dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan berbagai program strategis. DKPPP menjadi perangkat daerah utama dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp.924 juta, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp.450 juta, serta Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp758 juta untuk mendukung pembangunan pangan hewani, pangan lokal, biofortifikasi, hingga pengelolaan susut pangan. Di bidang infrastruktur dasar, DBMSDA mengelola Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp.49,92 miliar untuk konservasi air dan peningkatan kualitas sungai, sedangkan DISPERKIMTAN menangani pengembangan SPAM dan sistem air limbah dengan total pendanaan lebih dari Rp.45,8 miliar. Sementara itu, DLH memperoleh alokasi besar sebesar Rp.132,36 miliar untuk pengelolaan persampahan dan penguatan tata kelola sampah berkelanjutan.

Pada Program Nasional 3, Pemerintah Kota Bekasi mendukung pengembangan ekosistem digital dan koperasi sektor produksi. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp.13,51 miliar yang dilaksanakan DISKOMINFOSTANDI menjadi instrumen utama transformasi digital daerah. Selain itu, DISPARBUD mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem gim melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.200 juta, sedangkan DKUKM melaksanakan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp.467,25 juta untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Pada Program Nasional 4, fokus pembangunan diarahkan pada pendidikan, kesehatan, riset, dan pengembangan talenta nasional. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sangat besar untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 595,69 miliar melalui DISDIK guna mendukung perluasan layanan PAUD, revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggul, dan peningkatan kualitas pendidikan. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.3,2 miliar juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas guru dan tenaga pendidikan. Di bidang kesehatan, DINKES memperoleh alokasi Rp.371,67 miliar melalui Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat untuk mendukung penurunan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, hingga pelayanan kesehatan primer. Selain itu, Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan sebesar Rp. 16,22 miliar mendukung penguatan tenaga kesehatan daerah.

Penguatan inovasi dan pengembangan talenta juga menjadi bagian penting dukungan terhadap Asta Cita. BAPPERIDA melaksanakan Program Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp2,55 miliar untuk mendukung pengembangan riset dan inovasi nasional. DISPORA memperoleh alokasi sangat besar sebesar Rp.240,01 miliar melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan guna mendukung pengembangan Manajemen Talenta Nasional bidang olahraga. Selain itu, pengembangan seni budaya juga didukung melalui Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp.1,17 miliar.

Pada Program Nasional 6, Pemerintah Kota Bekasi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, penguatan UMKM, penyediaan perumahan, dan pelayanan publik kewilayahan. DINSOS melaksanakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.3,04 miliar untuk mendukung bantuan sosial adaptif. DKUKM mengalokasikan Program Pengembangan UMKM sebesar Rp.1,75 miliar untuk mendukung usaha produktif dan afirmatif masyarakat. Selain itu, DISPERKIMTAN menjalankan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp.66,88 miliar untuk mendukung penyediaan perumahan dan infrastruktur dasar, sedangkan kecamatan memperoleh anggaran Rp.4,7 miliar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat wilayah.

Dalam mendukung Program Nasional 7, fokus diarahkan pada reformasi birokrasi, pengawasan, transformasi digital, dan penguatan karakter bangsa. ITKO menjalankan Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp.1,54 miliar untuk pencegahan tindak pidana korupsi. BKPSDM mengelola Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp.10,86 miliar guna meningkatkan kesejahteraan ASN berbasis kinerja. Selain itu, DISKOMINFOSTANDI kembali menjadi motor transformasi digital pelayanan publik melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp.13,51 miliar. BAPENDA mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp.5,96 miliar, sedangkan BAKESBANGPOL melaksanakan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp.1,89 miliar.

Pada Program Nasional 8, Pemerintah Kota Bekasi mendukung pemajuan kebudayaan nasional melalui Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp.1,17 miliar yang dilaksanakan DISPARBUD untuk memperkuat pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan wawasan kebudayaan masyarakat.

Selain mendukung program nasional, Kota Bekasi juga mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis melalui DKPPP sebesar Rp.758 juta, revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggul melalui DISDIK sebesar Rp.595,69 miliar, serta pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas melalui DINKES sebesar Rp.371,67 miliar.

Secara keseluruhan, sintesa program menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan sinkronisasi yang kuat antara agenda pembangunan daerah dan Asta Cita nasional melalui dukungan program lintas sektor

dengan pendanaan yang signifikan. Fokus terbesar diarahkan pada pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan, transformasi digital, dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen Kota Bekasi dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis peningkatan kualitas hidup masyarakat.

CAPAIAN KINERJA TEMATIK PEMBANGUNAN

A. PENANGANAN STUNTING

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir pada tahun 2024, prevalensi stunting pada balita secara nasional sekitar 19,8 persen. Sedangkan untuk capaian prevalensi stunting Kota Bekasi 9,20 persen. Namun realisasi capaian tahun 2025 belum ada data yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

Target pengurangan stunting Kota Bekasi tahun 2026 yaitu sebesar 10,55 persen. Untuk mencapai target tersebut, terdapat 55 program dengan total anggaran yang dialokasikan sekitar Rp941 miliar. Adapun capaian pelaksanaan program hingga Triwulan I, realisasi fisiknya mencapai 23,64 persen dan realisasi keuangannya baru 8,15 persen. Realisasi fisik tersebut menunjukkan bahwa aktivitas lapangan sebenarnya sudah mulai berjalan Namun belum diikuti pencairan/administrasi keuangan. Sementara realisasi keuangan mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran masih sangat rendah dan banyak program belum berjalan optimal secara administrasi dan keuangan.

Dari sisi struktur program, terdapat 55 program, 89 kegiatan, dan 701 subkegiatan yang dilaksanakan oleh 43 perangkat daerah (OPD). Berdasarkan statistik pelaksanaan program, sebanyak 25 program atau 23,15 persen telah memiliki realisasi keuangan di atas 10 persen dan dikategorikan baik. Sebanyak 42 program atau 38,89 persen masih berada pada kategori rendah dengan realisasi 0,01–10 persen, sedangkan 41 program atau 37,96 persen belum berjalan secara keuangan dengan realisasi 0 persen. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program stunting masih memerlukan akselerasi terutama pada tahap administrasi dan pencairan anggaran.

Perangkat daerah dengan capaian realisasi keuangan tertinggi adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) dengan realisasi Rp.107,38 miliar atau 35,46 persen dari total anggaran Rp.302,82 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman dan sanitasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung penanganan stunting. Posisi kedua ditempati Dinas Pendidikan dengan realisasi Rp.38,16 miliar atau 13,40 persen dari anggaran Rp.284,96 miliar, terutama melalui program pembangunan ruang kelas baru dan pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Dinas Kesehatan berada pada posisi ketiga dengan realisasi Rp.8,91 miliar atau 3,47 persen dari total anggaran Rp.256,52 miliar. Rendahnya serapan keuangan di sektor kesehatan menunjukkan perlunya percepatan implementasi program kesehatan ibu dan anak, intervensi gizi, serta layanan kesehatan pendukung penurunan stunting.

Dari sisi realisasi fisik, capaian tertinggi diperoleh UPTD Puskesmas (34 puskesmas) sebesar 44,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas layanan kesehatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, pemantauan balita, dan pelayanan gizi telah berjalan cukup aktif di lapangan. Dinas Kesehatan mencatat realisasi fisik sebesar 22,73 persen, sedangkan Dinas Perkim mencapai 21,29 persen. Sementara itu, Dinas Pendidikan baru mencapai 6,93 persen sehingga masih diperlukan percepatan kegiatan fisik di sektor pendidikan pendukung penanganan stunting.

Subkegiatan dengan realisasi keuangan tertinggi adalah pembangunan ruang kelas baru pada sektor permukiman dan pendidikan dengan realisasi Rp.80,15 miliar atau 55,87 persen. Selain itu, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar mencapai Rp.38,13 miliar atau 33,56 persen, serta penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp.27,02 miliar atau 15,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penanganan stunting tidak hanya dilakukan melalui intervensi kesehatan langsung, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pendidikan, sanitasi, dan infrastruktur dasar masyarakat.

Analisis perbandingan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik menunjukkan adanya gap negatif pada seluruh OPD utama. UPTD Puskesmas memiliki gap terbesar sebesar -43,41 persen, yang berarti pelayanan kesehatan sudah berjalan luas namun dukungan pencairan anggaran belum optimal. Dinas Kesehatan memiliki gap -19,26 persen, Perkim -14,17 persen, dan Dinas Pendidikan -6,47 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak kegiatan telah berjalan secara operasional, tetapi proses administrasi dan penyerapan keuangan masih tertinggal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan stunting Kota Bekasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan pendekatan lintas sektor melalui dukungan bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, permukiman, dan pelayanan dasar masyarakat. Realisasi fisik yang relatif lebih tinggi dibanding realisasi keuangan menunjukkan komitmen pelaksanaan program di lapangan sudah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pengendalian program, percepatan pengadaan, serta optimalisasi penyerapan anggaran agar target penurunan stunting dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. PENGENTASAN KEMISKINAN

Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,69 persen. Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 3.96 persen. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 4,01 persen. Meskipun mengalami penurunan persentase, secara jumlah penduduk miskin Kota Bekasi mengalami peningkatan dari 128,84 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 129,54 ribu jiwa di tahun 2025.

Target pengurangan kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2026 yaitu sebesar 3,55 persen. Untuk mencapai target tersebut, alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp772 miliar dan terdistribusi dalam 28 program di berbagai perangkat daerah. Hingga Triwulan I tahun 2026, realisasi fisik mencapai 15,81 persen. Namun realisasi anggaran baru 3,92 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanganan kemiskinan masih sangat lambat secara keuangan. Aktivitas lapangan sudah mulai berjalan tetapi belum diikuti penyerapan anggaran.

Dari sisi struktur program, terdapat 28 program, 41 kegiatan, dan 473 subkegiatan yang dilaksanakan oleh 12 perangkat daerah (OPD). Statistik program menunjukkan bahwa sebagian besar program masih berada pada kategori rendah dan belum berjalan secara keuangan. Sebanyak 25 program atau 23,15 persen memiliki realisasi keuangan di atas 10 persen dan dikategorikan baik, sedangkan 42 program atau 38,89 persen masih berada pada kategori rendah dengan realisasi 0,01–10 persen. Selain itu, terdapat 41 program atau 37,96 persen yang belum memiliki realisasi keuangan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi dan proses penyerapan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan capaian realisasi keuangan perangkat daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yaitu sebesar Rp.21,24 miliar atau 37,86 persen dari total anggaran Rp.56,12 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Posisi kedua ditempati Dinas Pendidikan dengan realisasi Rp.24,35 miliar atau 5,26 persen dari total anggaran Rp. 462,94 miliar, terutama melalui kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan pembangunan sarana pendidikan. Sementara itu, Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas belum mencatat realisasi keuangan meskipun kegiatan fisik pelayanan telah berjalan di lapangan.

Dari sisi realisasi fisik, capaian tertinggi diperoleh UPTD Puskesmas (34 puskesmas) sebesar 45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan dasar kepada kelompok rentan telah aktif dilaksanakan meskipun dukungan keuangan belum sepenuhnya terserap. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat realisasi fisik sebesar 28 persen, sedangkan Dinas Kesehatan mencapai 21,20 persen. Dinas Pendidikan masih berada pada capaian 3,33 persen yang menunjukkan sebagian besar kegiatan pendidikan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

Sub kegiatan dengan realisasi keuangan tertinggi didominasi oleh sektor permukiman dan pendidikan. Kegiatan rehabilitasi gedung ruang kelas baru tingkat SMP mencapai realisasi 61,59 persen, sedangkan rehabilitasi gedung ruang kelas tingkat SD mencapai 36,05 persen. Selain itu, pembangunan ruang kelas baru SD mencapai realisasi 55,87 persen. Pada sektor pendidikan, penyelenggaraan proses belajar peserta didik tingkat SD mencapai 11,55 persen dan tingkat SMP sebesar 7,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akses pendidikan dan perbaikan sarana sekolah menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Analisis perbandingan realisasi fisik dan keuangan menunjukkan adanya gap negatif yang cukup besar pada seluruh OPD utama. UPTD Puskesmas memiliki gap tertinggi sebesar -45 persen, sedangkan Dinas Kesehatan memiliki gap -21,20 persen. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat gap -9,86 persen dan Dinas Pendidikan sebesar -1,93 persen. Gap negatif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik telah berjalan lebih cepat dibandingkan proses pencairan dan penyerapan keuangan.

Berdasarkan insight utama pada data, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan, antara lain proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), layanan kesehatan, serta administrasi pembayaran yang masih dalam proses. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program pengentasan kemiskinan sebenarnya telah berjalan secara operasional, namun belum seluruhnya tercatat dalam realisasi keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan adanya upaya lintas sektor melalui pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat. Fokus pembangunan pada sektor pendidikan dan infrastruktur dasar menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Namun demikian, percepatan penyerapan anggaran, penguatan administrasi keuangan, dan akselerasi pelaksanaan program masih diperlukan agar target pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

C. PENGENDALIAN INFLASI

Inflasi Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 3,02 persen. Hal ini menjadi salah satu perhatian karena dipengaruhi oleh tingginya dinamika perkotaan, pertumbuhan penduduk, serta ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok bahan makanan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga akibat fluktuasi harga komoditas serta distribusi barang yang belum sepenuhnya stabil. Meskipun demikian, kondisi inflasi Kota Bekasi secara umum masih relatif terkendali melalui berbagai upaya pengendalian inflasi daerah, seperti penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, pemantauan harga bahan pokok, serta kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan pangan.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,21 miliar untuk mengendalikan inflasi. Anggaran tersebut terdistribusi dalam 14 program yang akan dilaksanakan. Hingga Triwulan I tahun 2026, realisasi fisik baru 3,57 persen dan realisasi anggaran baru 3,04 persen. Kinerja program pengendalian inflasi masih sangat rendah dengan mayoritas program belum berjalan. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan program belum optimal sehingga dampak pembangunan terhadap masyarakat masih terbatas.

Dari sisi struktur program, terdapat 14 program, 19 kegiatan, dan 21 subkegiatan yang mendukung pengendalian inflasi daerah. Komposisi anggaran terbesar dialokasikan pada Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp.17,10 miliar atau 56,65 persen dari total anggaran. Program ini berperan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas logistik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi.

Alokasi terbesar kedua terdapat pada Program Perdagangan sebesar Rp.5,41 miliar atau 17,91 persen. Program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pasar, memperkuat distribusi barang, serta meningkatkan sarana perdagangan masyarakat. Selanjutnya, Program Penempatan Tenaga Kerja memperoleh alokasi sebesar Rp.3,15 miliar atau 10,43 persen sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja.

Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan perhatian pada penguatan ketahanan pangan dan kesehatan hewan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp.472 juta atau 7,65 persen serta Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp.2,07 miliar atau 6,50 persen. Program-program ini menjadi instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan mengantisipasi gejolak harga bahan pangan strategis.

Meskipun alokasi anggaran cukup besar, realisasi program masih sangat rendah. Sebanyak 10 program atau 76,92 persen tercatat belum memiliki realisasi keuangan sama sekali. Program yang belum berjalan secara keuangan meliputi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Pemberdayaan UMKM, Perikanan Budidaya, Pengelolaan Perikanan, Stabilitas Harga Pangan, serta Perencanaan dan Koordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program pengendalian inflasi masih berada pada tahap persiapan administrasi dan pelaksanaan awal.

Berdasarkan capaian realisasi anggaran, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan menjadi program dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar 12,37 persen atau Rp.670,15 juta. Capaian ini menunjukkan adanya upaya percepatan pada sektor distribusi dan perdagangan sebagai komponen utama pengendalian inflasi. Posisi kedua ditempati Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi 9,68 persen atau Rp.12,75 juta. Sementara itu, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mencapai realisasi 2,36 persen atau Rp.9,53 juta, dan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) baru terealisasi sebesar 1,32 persen atau Rp.226,24 juta.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pengendalian inflasi Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah telah difokuskan pada penguatan distribusi perdagangan, ketahanan pangan, transportasi logistik, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, rendahnya realisasi keuangan dan fisik menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi proses administrasi dan pengadaan agar program pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.

D. PENGURANGAN PENGANGGURAN

Kualitas dan taraf hidup masyarakat Kota Bekasi dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja indikator TPT Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 104.56 persen dari target 7.68 persen dan terealisasi 7.33 persen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi TPT, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Pengangguran Kota Bekasi tahun 2025 masih didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan dengan masing-masing sebesar 23.384 orang dan 39.272 orang.

Pada tahun 2026, target pengurangan TPT Kota Bekasi yaitu sebesar 7,32 persen. Untuk mencapai target tersebut, akan dilaksanakan melalui 2 program dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,9 miliar. Namun

demikian, hingga Triwulan I tahun 2026, baik realisasi fisik dan realisasi anggaran masih 0.

Dari sisi struktur program, terdapat 2 program utama, 3 kegiatan, dan 3 subkegiatan yang menjadi instrumen utama dalam upaya pengurangan pengangguran. Program terbesar adalah Program Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,15 miliar atau 63,80 persen dari total anggaran. Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang kerja serta mendukung penempatan tenaga kerja, termasuk perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memperoleh alokasi sebesar Rp.1,79 miliar atau 36,20 persen dari total anggaran. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam memperoleh pekerjaan.

Meskipun kedua program telah memiliki alokasi pendanaan, seluruh program tercatat belum memiliki realisasi keuangan maupun fisik. Status program menunjukkan bahwa 2 program atau 100 persen masih berada pada kategori realisasi 0 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pelaksanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja masih belum dimulai secara operasional.

Berdasarkan rincian program dan anggaran, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki anggaran sebesar Rp.1,79 miliar tanpa realisasi. Program ini terdiri dari kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Sementara itu, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp.3,15 miliar juga belum terealisasi dan mencakup kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahap pra dan pasca penempatan.

Pada indikator top realisasi fisik tertinggi, seluruh kegiatan masih menunjukkan realisasi 0 persen. Baik kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, maupun perlindungan pekerja migran belum menunjukkan progres pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan pelaksanaan program agar target pengurangan pengangguran dapat tercapai sesuai rencana.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pengurangan pengangguran Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan telah difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja masyarakat. Namun rendahnya realisasi anggaran dan belum dimulainya kegiatan fisik menunjukkan bahwa implementasi program masih memerlukan percepatan, terutama dalam proses administrasi, pengadaan kegiatan pelatihan, serta penguatan koordinasi pelaksanaan program ketenagakerjaan. Optimalisasi pelaksanaan kedua program tersebut menjadi penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, serta memperkuat daya saing tenaga kerja Kota Bekasi di masa mendatang.

E. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IKP Kota Bekasi ini bahkan berada pada peringkat kedua secara Nasional dengan nilai 93,90 poin setelah

Kota Denpasar. Namun pada tahun 2025, IKP Kota Bekasi turun secara signifikan menjadi 73,07 poin. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya perbedaan rumus penghitungan nilai IKP yang dilakukan sebelumnya dengan tahun 2025.

Pada tahun 2026, Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk melaksanakan 5 program terkait ketahanan pangan. Namun hingga Triwulan I tahun 2026, realisasi fisiknya masih 0 dan realisasi anggarannya 0,66 persen.

Dari sisi struktur program, terdapat 5 program, 8 kegiatan, dan 8 subkegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah. Komposisi anggaran terbesar dialokasikan pada Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp.2,09 miliar atau 62,26 persen dari total anggaran. Program ini diarahkan untuk mengantisipasi dan menangani wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Alokasi terbesar kedua terdapat pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp.807,95 juta atau 24,05 persen. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang mendukung produktivitas pangan daerah. Selanjutnya, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memperoleh alokasi sebesar Rp.131,72 juta atau 3,91 persen untuk mendukung keamanan pangan asal hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pemerintah Kota Bekasi juga mengalokasikan Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp.178 juta atau 5,30 persen untuk mendukung keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, Program Pengawasan Keamanan Pangan memperoleh alokasi sebesar Rp.150 juta atau 4,47 persen guna memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Meskipun sebagian besar program belum menunjukkan realisasi, terdapat beberapa kegiatan yang telah mulai berjalan. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi program dengan realisasi anggaran tertinggi yaitu sebesar 9,68 persen atau Rp.12,75 juta. Program ini juga mencatat realisasi fisik tertinggi sebesar 9,68 persen yang menunjukkan adanya pelaksanaan awal kegiatan pengawasan kesehatan hewan dan keamanan pangan hewani.

Selain itu, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mencatat realisasi fisik tertinggi sebesar 10,70 persen pada salah satu sub kegiatan pengembangan sarana pertanian. Namun dari sisi keuangan, program ini baru terealisasi sebesar 1,18 persen atau Rp.9,53 juta. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan fisik telah mulai berjalan di lapangan meskipun proses pencairan dan penyerapan anggaran masih rendah.

Di sisi lain, terdapat tiga program utama yang sama sekali belum memiliki realisasi keuangan maupun fisik, yaitu Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Ketiga program tersebut menjadi bagian dari daftar program dengan realisasi anggaran terendah yaitu 0 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan strategis ketahanan pangan masih berada pada tahap perencanaan atau persiapan administrasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja peningkatan ketahanan pangan Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah telah diarahkan pada penguatan sistem pangan melalui penanganan kerawanan pangan, peningkatan sarana pertanian, pengawasan keamanan pangan, dan pengendalian kesehatan hewan. Namun rendahnya realisasi keuangan dan belum optimalnya capaian fisik menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi proses administrasi dan pengadaan agar target ketahanan pangan daerah dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

A. REKPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2026 melaksanakan berbagai pembangunan daerah yang didukung oleh perencanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan pengalokasian anggaran sebagai dasar pencapaian target kinerja pembangunan. Pelaksanaan program dan dukungan sumber daya yang menjadi landasan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, yang terdiri atas 122 program, 248 kegiatan, dan 710 sub kegiatan yang didukung oleh 2.533 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7,18 triliun.

Dari keseluruhan alokasi anggaran tersebut, porsi terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 53,10 persen, diikuti Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar sebesar 28,07 persen, serta Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar sebesar 11,35 persen. Komposisi program dan distribusi anggaran tersebut menunjukkan fokus dan prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2026.

B. REKPITULASI PER UNIT KERJA

Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran pembangunan pada seluruh perangkat daerah sebagai dukungan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja daerah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi per unit kerja, terdapat lima perangkat daerah dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp1,82 triliun, Dinas Kesehatan sebesar Rp767,98 miliar, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp666,96 miliar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp578,43 miliar, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp337,17 miliar. Besarnya alokasi anggaran pada perangkat daerah tersebut menunjukkan adanya prioritas pembangunan yang diarahkan pada sektor pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penataan kawasan permukiman, penguatan pelayanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan hidup.

C. TARGET DAN REALISASI PER URUSAN

Progres pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2026 pada Triwulan I dimonitor melalui realisasi fisik dan anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan

program, kegiatan dan subkegiatan. Berdasarkan gambar di bawah ini, Pemerintah Kota Bekasi mengelola total anggaran sebesar Rp7,18 triliun, dengan rencana anggaran pada Triwulan I sebesar Rp1,96 triliun. Sampai dengan akhir Triwulan I, realisasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan capaian fisik sebesar 19,21 persen, dengan realisasi anggaran sebesar Rp864,26 miliar atau 12,03 persen terhadap total anggaran tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada awal tahun anggaran telah berjalan, meskipun realisasi keuangan masih berada pada tahap awal sesuai pola penyerapan anggaran pada triwulan pertama.
Berdasarkan capaian per urusan, Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai kelompok urusan dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp4,42 triliun, mencatat realisasi fisik sebesar 19,74 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp490,13 miliar atau 11,08 persen. Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan alokasi Rp1,20 triliun merealisasikan capaian fisik sebesar 14,68 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp181,47 miliar atau 15,06 persen. Urusan Pemerintahan Pilihan mencatat capaian fisik sebesar 13,49% dengan realisasi anggaran 14,68 persen, sementara Unsur Kewilayahan menunjukkan capaian fisik tertinggi sebesar 25,40 persen , yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program kewilayahan pada tingkat kecamatan telah berjalan relatif lebih cepat pada Triwulan I.

Dari sisi komposisi anggaran, alokasi terbesar masih didominasi oleh Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar sebesar 61,55 persen dari total anggaran, diikuti Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar sebesar 16,77 persen, Unsur Kewilayahan sebesar 7,91 persen, serta kelompok urusan lainnya dengan proporsi yang menyesuaikan karakteristik pelaksanaan program.

D. REALISASI PROGRAM

Pelaksanaan program Kota Bekasi Tahun 2026 Triwulan I sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan daerah menunjukkan capaian yang bervariasi, baik dari realisasi fisik maupun penyerapan anggaran. Alokasi anggaran terbesar masih didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3,81 triliun atau 53,13 persen dari total anggaran program, diikuti Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp630,90 miliar (8,79 persen), Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp383,20 miliar (5,33 persen), Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp291,63 miliar (4,06 persen), serta Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp223,17 miliar (3,11 persen).
Besarnya alokasi pada program-program tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan Kota Bekasi masih difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
Capaian realisasi fisik tertinggi, terdapat pada beberapa program yang telah menunjukkan progres pelaksanaan yang sangat baik pada Triwulan I. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mencatat capaian fisik tertinggi sebesar 100,00 persen, diikuti Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar 73,33 persen, Program Pemberdayaan Sosial sebesar 66,67 persen, Program Penanggulangan Bencana sebesar 48,49 persen, serta

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 33,33 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa beberapa program sektoral dengan ruang lingkup pelaksanaan yang lebih spesifik telah mampu direalisasikan secara optimal pada awal tahun anggaran.

Berdasarkan realisasi anggaran tertinggi, Program Pengembangan Perumahan mencatat penyerapan anggaran tertinggi sebesar 34,07 persen, diikuti Program Pengelolaan Persampahan sebesar 23,28 persen, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 16,22 persen, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 12,49 persen, serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 11,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program yang berkaitan dengan pembangunan fisik, pelayanan dasar, serta dukungan operasional pemerintahan telah berjalan relatif lebih cepat dari sisi penyerapan anggaran pada Triwulan I.
Terdapat beberapa program dengan realisasi anggaran terendah, termasuk program yang belum menunjukkan penyerapan anggaran. Program dengan realisasi terendah antara lain Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar 0,02 persen, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 0,04 persen, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 0,46 persen, Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,62 persen, serta Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 0,72 persen. Selain itu, terdapat beberapa program yang masih mencatat 0,00 persen realisasi anggaran, seperti Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengelolaan Arsip. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian program masih berada pada tahap persiapan administrasi, verifikasi dokumen, proses pengadaan, maupun penjadwalan pelaksanaan kegiatan.

E. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja perangkat daerah merupakan instrumen pengukuran kinerja final yang digunakan sebagai dasar penilaian resmi terhadap tingkat capaian kinerja program pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Data pada evaluasi kinerja disusun berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan konsolidasi atas data shadow output yang telah diinput sebelumnya, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara dokumen pendukung. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 19,90 persen. Secara umum, nilai realisasi kinerja pada masing-masing perangkat daerah menunjukkan selisih yang relatif tidak terlalu signifikan.
Pada kelompok 3 capaian tertinggi, posisi pertama ditempati oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian 62,19 persen terhadap target tahun 2026 pada Triwulan I. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan kesehatan, dukungan operasional, serta pemenuhan indikator kinerja telah berjalan sangat optimal sejak awal tahun. Posisi kedua, Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian 56,15 persen, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan program pelayanan kesehatan sudah mulai berjalan dan sesuai target yang direncanakan. Selanjutnya, Selanjutnya, Kecamatan Bekasi Timur dengan capaian 36,70

persen, yang menunjukkan progres positif dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan fasilitas kesehatan, serta dukungan program kesehatan daerah. Sementara, Pada kelompok 3 capaian terendah, posisi terbawah ditempati oleh Dinas Pendidikan dengan capaian 6,60 persen, diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 8,57 persen, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar 9,68 persen terhadap target tahun 2026.

F. CAPAIAN SHADOW OUTPUT PERANGKAT DAERAH

Realisasi shadow output merupakan instrumen pendukung yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses penginputan capaian output program, kegiatan, dan indikator kinerja secara lebih rinci dan terstruktur pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Data shadow output berfungsi sebagai basis data operasional yang digunakan untuk membantu perhitungan progres capaian kinerja per program, kegiatan, subkegiatan, serta indikator output secara berkala. Melalui mekanisme ini, perangkat daerah dapat melakukan pemantauan progres pelaksanaan subkegiatan secara lebih dini, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan secara cepat, serta memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Rata-rata realisasi shadow output *perangkat* daerah pada Triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 15,14 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan subkegiatan pada Triwulan I berada pada tahap awal implementasi. Nilai rata-rata ini selanjutnya menjadi salah satu indikator penting dalam proses pengendalian dan evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program serta sebagai dasar percepatan capaian output pada triwulan berikutnya.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis dari capaian IKU dan IKD. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi tersebut disajikan ke dalam 4 (empat) aspek pembangunan.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan geografi di Kota Bekasi, antara lain:

a. Daya dukung/ketersediaan air secara keseluruhan telah melewati ambang batas dan luasannya mencapai 19.742,98 ha;
b. Daya dukung pangan sudah melampaui batas dengan selisih (kekurangan) mencapai 2.030.095.735.379,97 kkal;
c. Alih fungsi lahan untuk perumahan, industri, dan jasa menyebabkan lahan pertanian yang tersisa hanya 15 persen dari luas lahan total;
d. Intensitas pembangunan yang tinggi menyebabkan kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi mencapai 73 persen sehingga ketersediaan lahan semakin terbatas dan mahal;
e. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi menurun secara signifikan dari 93,9 poin di tahun 2024 menjadi 73,07 poin di tahun 2025;

f. Kualitas lingkungan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun dengan capaian IKLH tahun 2024 hanya 50,70 poin dan masuk kategori “waspada”;
g. Kota Bekasi mengalami persentase akses sanitasi aman dengan gap yang cukup tinggi yaitu dari 28,49 persen pada tahun 2020 menjadi 21,41 persen pada tahun 2024;
h. Ancaman bencana banjir masih besar mengingat kondisi DAS, saluran drainase, dan kondisi tanah tidak mendukung untuk menyalurkan air di saat hujan; dan
i. Normalisasi dan naturalisasi sungai belum dilakukan secara optimal, sehingga belum mampu mengatasi permasalahan banjir dan genangan di Kota Bekasi.

Adapun permasalahan demografi di Kota Bekasi, antara lain:

a. Tekanan jumlah penduduk yang semakin besar hingga mencapai 2,648 juta jiwa pada tahun 2025 dengan distribusi yang belum merata;
b. Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi melebihi 16 ribu jiwa/km^2;
c. Tren usia produktif (15-64 tahun) tahun 2025-2030 menunjukkan penurunan dan jumlah penduduk usia lanjut yang cenderung meningkat dan diprediksi mencapai 252.160 jiwa di tahun 2030;
d. Jumlah penduduk didominasi kelompok umur produktif namun belum optimal terserap dalam pasar kerja mengingat TPT masih 7,33 persen di tahun 2025; dan
e. Penduduk komuter cenderung meningkat hingga mencapai 19,2 persen di tahun 2023 dan Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan komuter wilayah sekitar;
f. Adanya potensi lonjakan jumlah penduduk Kota Bekasi akibat urbanisasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya; dan
g. Adanya fenomena *aging population* dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak sehingga diperlukan kebijakan pro lansia.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi, antara lain:

a. LPE sebesar 5,39 persen belum mampu mengurangi tingginya ketimpangan pendapatan secara signifikan karena angkanya masih berada di 0,407 poin pada tahun 2025;
b. Tingginya TPT yang mencapai 7,33 persen di tahun 2025 menyebabkan bonus demografi belum dapat dioptimalkan;
c. Angka kemiskinan menunjukkan penurunan hingga mencapai 3,96 persen di tahun 2025, namun jumlah penduduk miskinnya meningkat dari 128,84 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 129,54 ribu jiwa di tahun 2025;
d. Masih adanya stunting yang mayoritas berada di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang;

e. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan SDM Kota Bekasi paling tidak hingga ke level D3 ataupun S1 mengingat RLS masih 12,11 atau setara kelas 3 SMA;
f. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang ditunjukkan dengan unsur UPLM 4 bernilai terendah dari keseluruhan unsur pembentuk IPLM;
g. Infrastruktur sektor pendidikan masih perlu ditambah dan dioptimalkan, terutama pada jenjang SMP;
h. Masih banyaknya masyarakat pekerja informal di Kota Bekasi yang belum mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
i. Pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian budaya lokal;
j. Perlu adanya kebijakan yang kuat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi dalam posisinya sebagai kota metropolitan yang mendukung akulturasi budaya;
k. Perlunya optimalisasi dan penyediaan pusat seni dan budaya;
a. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodasi;
b. Dengan iBangga sebesar 67,90 di tahun 2025 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga masuk dalam klasifikasi "Berkembang" sehingga perlu peningkatan agar mencapai "Tangguh";
c. Nilai Kota Layak Anak menurun signifikan dari 742,34 di tahun 2024 menjadi 501 di tahun 2025; dan

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing daerah di Kota Bekasi, antara lain:

a. Perlunya penguatan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal bagi investor;
b. TPAK yang tinggi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja mengingat TPT masih berada di angka 7,33 persen di tahun 2025;
c. IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga persaingan antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang;
d. Pilar dinamisme bisnis dari IDSD masih belum menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah;
e. Perlunya meningkatkan sektor potensial (ekonomi kreatif dan digital) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi;
f. Pengembangan ekonomi kreatif masih memerlukan dukungan faktor transportasi dan aksesibilitas serta faktor SDM, talenta dan pendidikan karena kedua faktor ini menunjukkan penurunan;
g. Belum optimalnya literasi digital masyarakat (Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk Kota Bekasi hanya 53,23 di tahun 2025) meskipun adopsi TIK sudah tinggi;

h. Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi sehingga perlu langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital;
i. Realisasi investasi mengalami penurunan di tahun 2025 sehingga diperlukan upaya perluasan investasi selain berbasis lahan;
j. Kota Bekasi raih predikat Upah Minimum Kota tertinggi di Indonesia tahun 2025 sehingga perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap investasi serta inflasi;
k. Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar;
l. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti polder, kolam retensi, dan tanggul mengingat Kota Bekasi memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi;
m. Belum optimalnya pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah;
n. Belum optimalnya pengelolaan air bersih, penyediaan lahan untuk pembangunan PSU, dan penyusunan *database* ketersediaan serta kebutuhan pemenuhan PSU;
o. Belum optimalnya penanganan pengelolaan persampahan mengingat timbulan sampah yang dihasilkan cenderung meningkat tetapi kapasitas pengolahannya terbatas;
p. Estetika kota perlu peningkatan untuk mendukung kenyamanan dan keindahan kota;
q. Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW yaitu 30 persen;
r. Kemantapan jalan di Kota Bekasi sudah mencapai 97,85 persen, namun di beberapa ruas jalan masih belum pada kondisi kemantapan baik;
s. Penetapan beberapa titik TOD yang berbasis LRT di Kota Bekasi perlu didukung adanya Integrasi antar angkutan publik pada area pendukungnya agar banyak daerah yang terlayani angkutan *feeder*;
t. Masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni di Kota Bekasi;
u. Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi karena angka inflasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif;
v. Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; dan
w. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.

ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi, antara lain:

a. Kualitas RB di Kota Bekasi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Roadmap* RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat

dan RB Nasional dan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara PD;

b. Pelayanan Publik di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi masih memerlukan peningkatan secara berkelanjutan;
c. Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengingat nilai SAKIP berada pada angka 67,98 di tahun 2025; dan
d. Belum optimalnya layanan publik berbasis digital.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

TANTANGAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI

Kota Bekasi adalah kota yang terus bertumbuh. Dengan penduduk lebih dari 2,6 juta jiwa, Kota Bekasi merupakan salah satu mesin ekonomi terpenting di kawasan Jabodetabek. Namun di balik denyut aktivitas ekonomi yang terus berkembang itu, tersimpan sejumlah tantangan struktural yang jika tidak ditangani dengan cermat, berpotensi menghambat laju pertumbuhan dan memperparah ketimpangan yang sudah ada.

Tahun 2026 adalah tahun yang tidak mudah, bukan hanya bagi Kota Bekasi, tetapi bagi hampir semua kota di dunia. Dinamika lingkungan strategis yang bergerak di berbagai tataran, dari ketegangan geopolitik global hingga persaingan investasi antarwilayah di Jawa Barat, semuanya mendarat di meja kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dengan derajat urgensi yang tidak bisa diabaikan.

A. TANTANGAN DARI TATARAN GLOBAL

Disrupsi Rantai Pasok Akibat Pergeseran Geopolitik. Dunia di tahun 2026 adalah dunia yang semakin terfragmentasi. Persaingan strategis antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa tidak lagi hanya terjadi di meja perundingan diplomatik tetapi merambah ke arena teknologi, semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ruang siber yang berdampak langsung pada rantai pasok global. Bagi Kota Bekasi yang perekonomiannya sangat terhubung dengan ekosistem industri manufaktur nasional, gangguan pada rantai pasok global adalah ancaman nyata. Bahan baku impor yang makin sulit didapat, harga komponen yang berfluktuasi, dan pasar ekspor yang makin protektif, berpotensi menekan kinerja sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung PDRB kota.

Tekanan Transisi Iklim dan Standar Keberlanjutan. Bekasi adalah kota yang sudah sangat akrab dengan banjir. Setiap musim hujan, sebagian wilayahnya tergenang dan ini bukan sekadar persoalan drainase, melainkan cerminan dari tekanan perubahan iklim yang makin nyata. Di tahun 2026, tekanan ini makin berlapis, selain bencana hidrometeorologi yang mengancam produktivitas ekonomi dan kualitas infrastruktur, sektor industri di Kota Bekasi juga menghadapi tuntutan adaptasi terhadap regulasi lingkungan yang makin ketat, terutama dari mitra dagang di pasar ekspor Eropa dan Amerika yang mensyaratkan standar keberlanjutan (*Environmental, Social, Governance*/ESG) yang semakin tinggi. Industri yang tidak mampu beradaptasi berisiko kehilangan akses ke pasar ekspor, kehilangan investor, dan pada akhirnya kehilangan daya saingnya.

Disrupsi Teknologi yang Menggeser Pola Kerja. Akselerasi kecerdasan buatan generatif, *Internet of Things*, dan otomatisasi industri yang makin masif di 2026 membawa dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi ia membuka peluang efisiensi dan inovasi. Di sisi lain ia mengancam lapangan kerja terutama pekerjaan-pekerjaan rutin dan semi-terampil yang masih mendominasi pasar kerja Kota Bekasi. Bagi kota dengan TPT 7,33 persen yang masuk tinggi di Jawa Barat, gelombang otomatisasi ini bisa menjadi beban tambahan yang memperparah tekanan ketenagakerjaan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan peningkatan kompetensi yang serius.

B. TANTANGAN DARI TATARAN NASIONAL

Pertumbuhan yang Belum Sepenuhnya Inklusif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,8–6,3 persen di 2027 memberikan sinyal optimisme. Namun angka pertumbuhan agregat menyembunyikan realitas yang lebih kompleks. Sektor informal masih mendominasi lebih dari 55 persen pasar tenaga kerja nasional, sementara stagnasi produktivitas manufaktur dan ketergantungan pada bahan baku impor menjadi hambatan struktural yang berdampak langsung pada daya saing kawasan industri di sekitar Jakarta, termasuk Kota Bekasi. Pertumbuhan yang tidak inklusif di tingkat nasional akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada di tingkat lokal.

Dinamika Pemindahan IKN yang Berdampak Ganda. Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa implikasi yang tidak sederhana bagi Kota Bekasi. Pemindahan sebagian aparatur pemerintah pusat ke IKN berpotensi menggeser permintaan hunian, jasa komersial, dan konsumsi dari kawasan Jabodetabek yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Kota Bekasi. Pergeseran ini memang tidak terjadi seketika, namun dampaknya yang bersifat gradual justru lebih berbahaya karena sering tidak terasa sampai pengaruhnya sudah signifikan. Kota Bekasi perlu bersiap menghadapi realitas bahwa gravitasi ekonomi kawasan Jabodetabek bisa bergeser perlahan seiring matangnya IKN.

Tekanan Kebijakan Fiskal Nasional. Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional yang berdampak pada pemotongan dan rasionalisasi transfer ke daerah menjadi tekanan fiskal yang nyata bagi Kota Bekasi di 2026. Ketergantungan pada dana transfer pusat yang makin dikurangi menuntut Kota Bekasi untuk makin mandiri secara fiskal. Ini merupakan sebuah tuntutan yang tepat secara prinsip, namun tidak mudah dalam praktiknya di tengah kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat.

C. Tantangan dari Tataran Regional Jawa Barat

Penurunan Peringkat Realisasi Investasi. Ini adalah alarm yang harus direspons segera. Peringkat realisasi investasi Kota Bekasi turun dari posisi keempat di Jawa Barat pada 2024 menjadi posisi ketujuh pada tahun 2025. Penurunan tiga peringkat dalam waktu singkat bukan angka yang bisa diabaikan. Ini adalah sinyal bahwa daerah-daerah lain sedang bergerak lebih cepat dalam menarik investasi. Kabupaten Subang dan Purwakarta yang menawarkan lahan lebih luas dengan biaya lebih kompetitif menjadi pesaing nyata, khususnya untuk investasi di sektor manufaktur padat lahan. Tantangan ini sekaligus mengandung pesan yang jelas bahwa model daya tarik investasi Kota Bekasi berbasis lahan sudah tidak lagi relevan.

Persaingan Ketat dalam Ekosistem Jabodetabek. Dalam ekosistem megapolitan Jabodetabek yang semakin kompetitif, setiap kota dan kabupaten berlomba memposisikan diri. Jakarta bergerak ke arah ekonomi jasa dan keuangan. Tangerang memperkuat diri sebagai pusat industri teknologi dan manufaktur presisi. Depok mengembangkan ekonomi berbasis pendidikan dan jasa kesehatan. Di tengah persaingan ini, Kota Bekasi perlu menemukan dan mempertahankan ceruk keunggulan kompetitifnya yang tidak mudah ditiru dan itu harus dimulai dari keputusan-keputusan kebijakan yang diambil di 2026.

D. Tantangan Struktural di Tingkat Lokal

Pengangguran Termasuk Tinggi di Jawa Barat. TPT 7,33 persen di 2025, meskipun turun dari 7,82 persen di 2024, tetap merupakan angka yang paling berat di antara seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada ratusan ribu kepala keluarga yang belum memiliki pekerjaan tetap, pemuda-pemudi yang lulus sekolah namun tidak terserap pasar kerja, dan potensi ekonomi yang terbuang sia-sia setiap harinya. Yang memperparah situasi ini adalah kesenjangan antara kualifikasi angkatan kerja dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. TPAK yang mencapai 64,10 persen menunjukkan bahwa keinginan untuk bekerja ada, namun kompetensi yang dimiliki tidak selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. *Mismatch* ini adalah tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi harus disertai dengan peningkatan kualitas dan relevansi SDM secara sistematis.

Paradoks UMK Tertinggi di Indonesia. UMK Bekasi sebesar Rp5.999.443,- per bulan di 2026 (tertinggi di Indonesia) adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia mencerminkan standar kesejahteraan pekerja yang tinggi dan menjadi kebanggaan. Di sisi lain ia adalah salah satu faktor yang membuat investor di sektor manufaktur padat karya berpikir dua kali sebelum memilih Kota Bekasi sebagai lokasi usaha. Ketika biaya produksi di Kota Bekasi jauh lebih tinggi dari daerah tetangga, sementara produktivitas belum mampu mengimbanginya, investor akan memilih lokasi alternatif yang lebih kompetitif. Tantangan kebijakan yang sesungguhnya bukanlah menurunkan UMK karena itu bukan pilihan yang adil bagi pekerja. Melainkan bagaimana menciptakan ekosistem bisnis yang membuat investor tetap memilih Bekasi meski dengan UMK tertinggi, yaitu dengan menawarkan nilai lain: kemudahan perizinan, infrastruktur konektivitas yang unggul, SDM yang produktif dan terampil, serta kepastian hukum berusaha yang terjamin.

Ketimpangan yang Belum Terselesaikan. Rasio Gini 0,407 di 2025 meskipun turun dari 0,435, masih menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Bekasi sebesar 5,39 persen di 2025 menghasilkan porsi yang lebih besar, namun porsi itu belum terdistribusi secara merata. Kelompok masyarakat menengah ke bawah belum merasakan manfaat pertumbuhan secara proporsional. Ini adalah tantangan inklusivitas yang jika dibiarkan akan menciptakan ketegangan sosial dan melemahkan fondasi ekonomi kota dalam jangka panjang.

Tekanan pada Kapasitas Fiskal Daerah. Meski PAD 2025 mencapai Rp3.507,71 miliar, meningkat 31,3 persen dari 2024, peningkatan ini harus dibaca dengan hati-hati. Lingkungan ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian di 2026 berpotensi menekan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pajak daerah yang sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha. Di saat bersamaan, kebutuhan belanja pembangunan terus meningkat. Tekanan fiskal ini menuntut manajemen keuangan daerah yang makin efisien, inovatif, dan tidak bergantung pada pola pendapatan konvensional semata.

Dari seluruh tantangan di atas, yang berlapis dari tataran global hingga lokal, ada satu benang merah yang mengikat semuanya. Kota Bekasi sedang berada di persimpangan transformasi. Model pertumbuhan lama yang berbasis industri manufaktur padat karya, lahan murah, dan posisi geografis sebagai kota penyangga Jakarta, sudah tidak lagi cukup untuk membawa Kota Bekasi ke level berikutnya. Yang dibutuhkan adalah transformasi

menuju model baru yaitu ekonomi berbasis jasa, teknologi, dan nilai tambah. Investasi yang ditarik bukan oleh murahnya lahan tetapi oleh kualitas ekosistemnya. Dan pertumbuhan yang tidak hanya besar secara agregat tetapi juga merata hingga ke masyarakat.
Di setiap tekanan yang dihadapi Kota Bekasi baik geopolitik yang tidak menentu, persaingan investasi yang makin ketat, pasar kerja yang belum terserap optimal, tersimpan peluang yang menunggu untuk dimanfaatkan. Berikut adalah peluang-peluang strategis yang dapat menjadi modal akselerasi perekonomian Kota Bekasi di tahun 2026.

1. Peluang dari Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif
Kota Bekasi memiliki salah satu tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tertinggi di Jawa Barat. Ini bukan kebetulan karena ini adalah buah dari tingginya tingkat pendidikan, mobilitas sosial yang dinamis, dan kedekatan dengan ekosistem digital Jakarta yang terus berkembang. Di tahun 2026, peluang ini makin terbuka lebar. Akselerasi kecerdasan buatan generatif, platform ekonomi digital, dan ekosistem startup teknologi yang terus tumbuh menciptakan ruang bagi Kota Bekasi untuk mengembangkan klaster ekonomi kreatif dan digital yang selama ini masih dalam tahap rintisan. Industri konten digital, jasa teknologi informasi, *e-commerce*, dan ekonomi platform adalah sektor-sektor yang tidak membutuhkan lahan luas, tidak sensitif terhadap tingginya UMK, dan memiliki daya serap tenaga kerja terdidik yang signifikan. Dengan lebih dari 2,6 juta jiwa yang sebagian besar adalah generasi produktif dengan literasi digital yang relatif tinggi, Kota Bekasi memiliki pasar sekaligus sumber daya manusia untuk ekonomi digital yang sangat potensial dan belum sepenuhnya dioptimalkan.

2. Peluang dari Pengembangan Infrastruktur TOD berbasis LRT Jabodebek
Beroperasinya LRT Jabodebek adalah salah satu *game changer* terbesar bagi Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir. Infrastruktur transportasi massal yang menghubungkan Kota Bekasi langsung ke jantung Jakarta ini membuka peluang pengembangan kawasan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) yang sangat signifikan. Kawasan-kawasan di sekitar stasiun LRT berpotensi bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang terintegrasi: hunian vertikal, pusat perbelanjaan, ruang kerja bersama (*co-working space*), dan fasilitas jasa yang menarik bagi kalangan profesional muda. TOD bukan sekadar proyek properti tetapi strategi pembangunan kota yang secara bersamaan menyelesaikan masalah kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan cepat sebelum nilai lahan di sekitar koridor LRT naik terlalu tinggi dan peluang pengembangan beralih ke tangan spekulan properti. Pemerintah Kota Bekasi perlu hadir dengan kebijakan tata ruang yang proaktif, insentif investasi yang tepat sasaran, dan visi pengembangan kawasan yang jelas dan konsisten.

3. Peluang dari *Repositioning* sebagai Pusat Jasa Industri dan Logistik
Penurunan peringkat investasi Kota Bekasi di sektor manufaktur padat lahan bukanlah semata kabar buruk. Ini adalah sinyal untuk bergeser ke segmen yang lebih bernilai. Kebijakan hilirisasi nasional dan dorongan investasi berbasis inovasi yang digalakkan pemerintah pusat membuka ruang bagi

Kota Bekasi untuk memposisikan diri sebagai pusat jasa industri dan logistik yang melengkapi kawasan manufaktur di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Dalam rantai nilai industri modern, jasa penunjang industri seperti desain, rekayasa, pengujian, sertifikasi, distribusi, dan manajemen rantai pasok memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dari produksi fisiknya. Kota Bekasi, dengan infrastruktur yang lebih matang, SDM yang lebih terampil, dan konektivitas yang lebih baik dibanding daerah tetangga, adalah kandidat ideal untuk mengisi ceruk ini.

4. Peluang dari Pasar Konsumsi Domestik yang Besar
Dengan lebih dari 2,6 juta jiwa dan pengeluaran per kapita yang terus meningkat, Kota Bekasi adalah pasar konsumsi domestik yang sangat besar dan belum sepenuhnya digarap secara optimal oleh pelaku usaha lokal. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 5,56 persen, jasa lainnya 9,24 persen, jasa perusahaan 8,46 persen, informasi dan komunikasi 8,37 persen, serta jasa pendidikan 6,28 persen di 2025, semuanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi kota. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa warga Kota Bekasi semakin konsumtif terhadap layanan jasa berkualitas. Mereka tidak perlu pergi ke Jakarta untuk mencari restoran yang baik, fasilitas kesehatan yang lengkap, atau pusat hiburan yang memadai, jika Kota Bekasi mampu menghadirkan semua itu dengan standar yang setara. Peluang pengembangan sektor jasa berbasis konsumsi lokal ini adalah salah satu yang paling realistis untuk diakselerasi di 2026 karena tidak bergantung pada kebijakan pusat dan tidak sensitif terhadap dinamika global.

5. Peluang dari Penguatan PAD dan Inovasi Fiskal
Lonjakan PAD sebesar 31,3 persen di 2025 menjadi Rp3.507,71 miliar adalah modal kepercayaan diri yang penting. Ia menunjukkan bahwa basis ekonomi Kota Bekasi cukup kuat untuk menghasilkan pendapatan daerah yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang yang cukup besar untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang belum dioptimalkan. Digitalisasi sistem perpajakan daerah, perluasan basis pajak dari sektor ekonomi digital yang selama ini sulit dijangkau instrumen fiskal konvensional, optimalisasi aset daerah melalui skema KPBU, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif merupakan peluang penguatan fiskal yang realistis untuk dikejar di 2026. Kemandirian fiskal yang lebih kuat adalah prasyarat bagi kemandirian kebijakan yang lebih besar.

6. Peluang dari Bonus Demografi yang Masih Berlanjut
Struktur demografis Kota Bekasi yang didominasi penduduk usia produktif adalah aset yang nilainya tidak ternilai jika dikelola dengan benar. Bonus demografi yang masih berlangsung memberikan jendela peluang yang terbatas waktunya. Jika SDM usia produktif ini berhasil ditingkatkan kompetensinya dan diserap secara produktif oleh pasar kerja, ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Namun jika tidak dikelola, TPT yang sudah tinggi akan makin membebani, dan bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi.

TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2026

Target ekonomi makro merupakan tolok ukur yang mencerminkan arah dan ambisi pembangunan Kota Bekasi dalam satu tahun rencana. Penetapan target tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sebagai dokumen induk, dengan mempertimbangkan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2026 Triwulan II, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

A. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 5,39 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,32 persen, dengan capaian kinerja sebesar 101,32 persen. Capaian ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 5,19 persen dan menunjukkan tren pemulihan yang menguat. Bertumpu pada momentum pertumbuhan ini dan memperhatikan realisasi LPE Kota Bekasi pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 5,59 persen, maka target tahun 2026 sebesar 6,38 persen masih realistis untuk dicapai.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp52,51 juta, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp49,16 juta dengan capaian kinerja 106,82 persen. Lompatan ini menempatkan target PDRB per kapita tahun 2026 pada angka Rp54,94 juta. Peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan mencerminkan tidak hanya pertumbuhan agregat, tetapi juga peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang dirasakan oleh penduduk Kota Bekasi secara lebih merata.

Kontribusi PDRB Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat ditargetkan tetap stabil di angka 4,5 persen pada tahun 2026, konsisten dengan capaian beberapa tahun terakhir. Stabilitas kontribusi ini harus dipertahankan di tengah persaingan yang semakin ketat dari daerah-daerah lain di Jawa Barat yang juga tengah mempercepat pembangunan ekonominya.

B. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,96 persen, belum mencapai target 3,69 persen (capaian 92,68 persen). Meskipun demikian, angka ini masih lebih baik dibanding beberapa kota lain di kawasan penyangga Jakarta dan menunjukkan tren penurunan jangka panjang yang konsisten. Pada tahun 2026, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,55 persen. Pencapaian target ini mensyaratkan intervensi yang lebih tepat sasaran berbasis data mikro per kecamatan, penguatan perlindungan sosial adaptif, dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja berkualitas.

Rasio Gini Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,407, sedikit lebih baik dari target 0,408. Artinya ketimpangan pendapatan mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat memburuk ke angka 0,435 pada tahun 2024. Perbaikan ini perlu dipertahankan dan dipercepat. Pada tahun 2026, Rasio Gini ditargetkan berada di angka 0,414. Penurunan Rasio Gini yang signifikan ini hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat inklusif yang menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan perluasan akses keuangan.

C. Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7,33 persen, melampaui target 7,68 persen dengan capaian kinerja 104,56 persen. Pencapaian positif ini menunjukkan bahwa upaya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2026, TPT ditargetkan menurun tipis menjadi 7,32 persen. Tantangan ketenagakerjaan Kota Bekasi, di mana tingginya TPAK belum sepenuhnya diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja yang memadai di sektor formal.

D. Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 84,43, melampaui target 83,80 dengan capaian kinerja 100,75 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, IPM ditargetkan mencapai 84,47. Peningkatan IPM ini didorong oleh perbaikan pada tiga komponen utamanya: Indeks Pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; Indeks Kesehatan melalui peningkatan angka harapan hidup; serta Indeks Pengeluaran melalui peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Prevalensi stunting yang pada tahun 2026 ditargetkan 8,5 persen. Penurunan prevalensi stunting yang signifikan ini memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga secara terpadu.

E. Lingkungan dan Keberlanjutan
Dua indikator lingkungan yang menjadi bagian dari target ekonomi makro tahun 2026 mencerminkan komitmen Kota Bekasi terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditargetkan sebesar 1,31 Ton CO_2eq per Miliar pada tahun 2026. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) target tahun 2026 dilakukan penyesuaian mengingat capaian tahun 2025 mencapai 51,46. Target awal IKLH tahun 2026 yaitu 47,46 disesuaikan menjadi 51,75. Kedua target ini sejalan dengan agenda transisi hijau nasional dan menjadi pertimbangan penting dalam arah kebijakan investasi serta pengembangan infrastruktur kota.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA BEKASI
Mencermati tantangan dan peluang yang telah diuraikan di atas dan diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan ekonomi Kota Bekasi Tahun 2026, antara lain:

1. Transformasi Iklim Investasi dari Kuantitas ke Kualitas

Kota Bekasi tidak lagi bisa bersaing dalam perang harga lahan dengan daerah-daerah yang memiliki ruang lebih luas. Yang harus dilakukan adalah menggeser kompetisi ke area yang berbeda di mana Kota Bekasi unggul. Arah kebijakan investasi di 2026 diarahkan pada: pertama, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan berusaha yang memangkas waktu, biaya, dan ketidakpastian bagi investor karena di era kompetisi investasi yang ketat, kecepatan dan kepastian adalah nilai yang tidak kalah penting dari murahnya lahan. Kedua, pengembangan insentif fiskal yang selektif dan

berbasis kinerja untuk menarik investasi di sektor jasa teknologi, ekonomi digital, logistik bernilai tambah, dan industri kreatif. Ketiga, penguatan sistem *one-stop service* investasi yang tidak hanya ramah di depan meja, tetapi juga memberikan pendampingan nyata pasca perizinan hingga investor benar-benar beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian kota.

2. Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan dan Pengurangan *Mismatch*

Menurunkan TPT yang tinggi di Jawa Barat adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Namun solusinya bukan sekadar membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya melainkan memastikan bahwa kualifikasi angkatan kerja Kota Bekasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri, sekarang dan di masa depan. Arah kebijakannya mencakup penguatan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri yang aktual; pengembangan ekosistem *link and match* antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha; fasilitasi kewirausahaan berbasis digital bagi pemuda usia produktif sebagai alternatif jalur ekonomi selain pekerjaan formal; perlindungan tenaga kerja yang seimbang; dan memastikan UMK yang tinggi diimbangi oleh produktivitas yang setara sehingga tidak menjadi beban yang mengurangi daya saing investasi kota.

3. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreatif

Bekasi harus segera memiliki cetak biru yang jelas tentang seperti apa ekosistem ekonomi digitalnya di 2029. Di 2026, langkah-langkah konkret yang perlu diambil antara lain: pembangunan atau pengembangan ruang inovasi digital (digital hub) yang menjadi tempat bertemunya talenta muda, startup, investor, dan mentor; insentif khusus bagi pelaku industri kreatif dan ekonomi digital lokal yang selama ini tumbuh secara organik tanpa dukungan ekosistem yang memadai; serta pengembangan infrastruktur digital termasuk konektivitas internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah kota sebagai prasyarat dasar ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

4. Optimalisasi Kawasan TOD sebagai Mesin Pertumbuhan Baru

Momentum LRT Jabodebek harus dikapitalisasi secara strategis di 2026. Kebijakan yang diperlukan mencakup: penetapan kawasan TOD prioritas dengan regulasi tata ruang yang jelas dan insentif pembangunan yang menarik; dorongan pembangunan hunian vertikal terjangkau di sekitar koridor LRT untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup; serta pengembangan kawasan komersial campuran (*mixed-use*) yang mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan ruang publik dalam satu ekosistem yang hidup dan produktif.

5. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pemberdayaan UMKM

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata adalah ancaman jangka panjang bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi kota. Kebijakan inklusivitas ekonomi di 2026 difokuskan pada: penguatan ekosistem UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan digitalisasi usaha, dan koneksi ke rantai pasok industri besar yang sudah beroperasi di Kota Bekasi; pengembangan pasar rakyat modern yang memberikan wadah bagi pedagang kecil untuk bersaing tanpa tersingkir oleh ritel modern; serta program ekonomi lokal berbasis kelurahan yang mendorong aktivitas ekonomi produktif di tingkat komunitas terkecil.

6. Inovasi dan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal adalah syarat kemandirian kebijakan. Di 2026, arah kebijakan fiskal diarahkan pada: digitalisasi penuh sistem perpajakan daerah untuk menutup kebocoran dan memperluas basis wajib pajak; optimalisasi aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD; pengembangan skema KPBU untuk membiayai infrastruktur strategis tanpa terlalu membebani APBD; serta efisiensi belanja operasional pemerintahan yang dialihkan secara terukur ke belanja modal dan belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

KINERJA PELAKSANAAN APBD KOTA BEKASI

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun anggaran 2024 Tahun Ukur 2025, Kota Bekasi berhasil meraih skor sebesar 66,7524 dengan predikat "Cukup Baik", namun secara kategorisasi performa nasional, Kota Bekasi mendapat nilai “C” dengan peringkat "Perlu Perbaikan". Meskipun menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan prosedur, skor tersebut mengindikasikan adanya deviasi antara realisasi kinerja dengan target standar nasional (ideal di atas 75,00), sehingga diperlukan langkah-langkah korektif yang lebih masif pada dimensi yang memiliki gap nilai cukup lebar terutama pada dimensi pelaksaan anggaran dan dimensi pemenuhan belanja wajib.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD merupakan basis empiris yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk tahun rencana. Kinerja APBD selama lima tahun terakhir mencerminkan kapasitas fiskal riil Kota Bekasi, pola penghimpunan pendapatan, kualitas penyerapan belanja, serta kemampuan daerah dalam mengelola pembiayaan secara *prudent*. Analisis ini dilakukan atas tiga komponen utama APBD (pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah) dengan menggunakan data realisasi APBD tahun 2021 hingga 2025 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, serta data realisasi APBD tahun 2025 yang bersumber dari LKPJ Kota Bekasi Tahun 2025.

A. PENDAPATAN DAERAH

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. PAD terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara absolut, meskipun kinerja pencapaian target cenderung berada di bawah 100 persen dan bersifat fluktuatif. Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi tumbuh dari Rp5.767,65 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp6.620,94 miliar pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 14,8 persen selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,5 persen per tahun.

Dari sisi pencapaian target, hanya pada tahun 2021 Kota Bekasi berhasil melampaui target pendapatan dengan kinerja sebesar 101,44 persen. Pencapaian ini ditopang oleh pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang mengangkat realisasi PAD dan transfer di atas proyeksi awal tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, kinerja pendapatan konsisten berada di bawah 100 persen: 98,96 persen pada 2022, 94,95 persen pada 2023, 89,97 persen pada 2024, dan 91,26 persen pada 2025. Rata-rata kinerja pendapatan selama periode 2021–2025 adalah 95,32 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan target pendapatan daerah secara rata-rata cenderung lebih optimistis dari kapasitas penghimpunan yang dapat dicapai.

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan komponen pendapatan yang paling strategis karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Realisasi PAD Kota Bekasi secara agregat menunjukkan tren peningkatan dari Rp2.536,71 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.507,71 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, perjalanan menuju angka tersebut diwarnai oleh sejumlah dinamika yang perlu dicermati.

Pada periode 2021–2023, PAD tumbuh secara konsisten: dari Rp2.536,71 miliar (2021) menjadi Rp2.598,63 miliar (2022), lalu meningkat ke Rp2.729,78 miliar (2023). Namun pada tahun 2024, realisasi PAD justru mengalami penurunan menjadi Rp2.671,24 miliar, atau turun sekitar 2,1 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah target yang justru meningkat signifikan menjadi Rp3.350,24 miliar, sehingga kinerja PAD tahun 2024 hanya mencapai 79,7 persen dari target (capaian terendah selama periode 2021–2025). Komponen pajak daerah, yang secara historis menjadi penyumbang terbesar PAD, mengalami tekanan dari perlambatan transaksi properti yang tercermin dari menurunnya realisasi BPHTB dan PBB.

Lonjakan PAD terjadi pada tahun 2025, di mana realisasinya mencapai Rp3.507,71 miliar, meningkat 31,3 persen dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang

memperluas jenis dan tarif retribusi daerah secara signifikan. Hal ini tercermin dari realisasi retribusi daerah tahun 2025 yang mencapai Rp587,80 miliar atau 106,71 persen dari target, serta lain-lain PAD yang sah yang melampaui target dengan kinerja 126,32 persen (Rp108,47 miliar). Di sisi lain, komponen pajak daerah masih menjadi titik lemah dengan realisasi Rp2.795,58 miliar atau hanya 80,54 persen dari target Rp3.470,97 miliar, menandakan bahwa potensi pajak daerah, khususnya dari sektor properti dan restoran, masih jauh dari teroptimalkan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan komponen terbesar dalam struktur Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Selama periode 2021–2025, realisasi pendapatan transfer bergerak dalam kisaran Rp3,02 triliun hingga Rp3,62 triliun. Tren kenaikan yang berlangsung dari 2021 hingga 2024 (dari Rp3.021,52 miliar menjadi Rp3.617,35 miliar) mengalami pembalikan pada tahun 2025 menjadi Rp3.113,22 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh bervariasinya besaran Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi DKI Jakarta yang bersifat tidak rutin dan tidak dapat diproyeksikan kepastiannya dari tahun ke tahun.

Meskipun realisasi transfer selalu mendekati atau melebihi targetnya (kinerja di atas 99 persen pada tahun 2024 dan 2025), tingginya proporsi transfer dalam total pendapatan mencerminkan ketergantungan fiskal yang masih perlu diatasi. Rata-rata proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah selama 2021–2025 masih berada di kisaran 47–53 persen.

3. Perubahan Struktur Pendapatan

Sebuah perubahan struktural yang signifikan terjadi mulai tahun 2022 ketika pos "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" menghilang dari struktur pendapatan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mereklasifikasikan beberapa jenis pendapatan yang sebelumnya masuk dalam pos tersebut (seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi) menjadi bagian dari Pendapatan Transfer. Perubahan klasifikasi ini perlu diperhitungkan dalam membaca tren longitudinal komponen pendapatan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.

Pada tahun 2025, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 53,0 persen, meningkat tajam dari kisaran 42–45 persen pada 2021–2023. Lompatan proporsi PAD ini mencerminkan perluasan basis pendapatan asli daerah yang ditopang oleh penambahan jenis retribusi baru. Namun perlu dicatat bahwa peningkatan proporsi ini juga dipengaruhi oleh penurunan realisasi transfer di tahun 2025, sehingga perbaikan kemandirian fiskal harus dikonfirmasi pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi selama periode 2021–2025 terus bertumbuh secara nilai absolut dan mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yang berkembang. Namun demikian, pencapaian terhadap target yang ditetapkan belum berjalan konsisten, hanya sekali melampaui target, selebihnya selalu berada di bawah. Kondisi ini mengisyaratkan dua tantangan struktural yang perlu ditangani secara serius. Pertama, penetapan target PAD perlu dilandasi oleh data potensi pajak dan retribusi yang lebih akurat dan mutakhir, agar tidak terjadi deviasi

yang berulang antara target dan realisasi. Kedua, diversifikasi sumber PAD perlu diperkuat agar pendapatan daerah tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi pajak properti maupun variasi pendapatan transfer yang sepenuhnya berada di luar kendali daerah. Kedua hal ini menjadi pelajaran penting sekaligus landasan dalam menyusun proyeksi pendapatan yang realistis untuk tahun P-RKPD 2026.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, yang manfaatnya hanya sampai satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Transfer terdiri dari transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya.

Belanja Daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan mewujudkan prioritas pembangunan. Kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi selama periode 2021–2025 secara konsisten berada di bawah pagu yang ditetapkan, dengan kisaran penyerapan antara 85 hingga 89 persen. Tidak ada satu tahun pun dalam periode ini di mana realisasi belanja mencapai atau melampaui 100 persen dari target, berbeda dengan komponen pendapatan yang setidaknya pernah melampaui target pada tahun 2021.

Secara absolut, total realisasi Belanja Daerah tumbuh dari Rp5.704,88 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp6.451,43 miliar pada tahun 2025, atau bertumbuh sebesar 13,1 persen selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan 3,1 persen per tahun. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,91 persen, dan terendah pada tahun 2025 sebesar 85,38 persen. Rata-rata kinerja realisasi Belanja Daerah selama periode 2021–2025 adalah 86,88 persen.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi secara konsisten mendominasi struktur Belanja Daerah Kota Bekasi dan menunjukkan tren peningkatan proporsi yang perlu dicermati secara kritis. Realisasi Belanja Operasi tumbuh dari Rp4.204,03 miliar (2021) menjadi Rp5.418,28 miliar (2025), dengan proporsi terhadap total belanja yang terus meningkat dari 73,7 persen pada 2021 menjadi 84,0 persen pada 2025. Komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menjadi dua pos terbesar, yang secara bersama-sama menyerap lebih dari 95 persen dari total Belanja Operasi.

Pada tahun 2025, kinerja Belanja Operasi tercatat 88,32 persen dari pagu Rp6.134,81 miliar. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp2.533,34 miliar (88,53 persen). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025 yang mulai aktif bekerja. Belanja barang dan jasa terealisasi Rp2.454,22 miliar (86,82 persen), belanja hibah Rp266,46 miliar (95,27 persen), dan belanja bantuan sosial Rp162,85

miliar (99,68 persen). Belanja subsidi hanya terealisasi 37,83 persen dari pagu karena penyesuaian kebutuhan yang jauh lebih rendah dari perkiraan awal.

2. Belanja Modal

Temuan yang paling kritis dalam analisis Belanja Daerah periode 2021–2025 adalah tren penurunan yang konsisten pada Belanja Modal, baik dari sisi realisasi absolut maupun proporsinya terhadap total belanja. Realisasi Belanja Modal bergerak menurun dari Rp1.189,30 miliar (2021) menjadi Rp1.014,77 miliar (2025), dengan fluktuasi pada tahun 2023 yang sempat sedikit meningkat ke Rp1.153,11 miliar sebelum kembali turun. Lebih mengkhawatirkan, proporsi Belanja Modal terhadap total belanja terus menyusut dari 20,8 persen pada 2021 menjadi hanya 15,7 persen pada 2025. Kinerja Belanja Modal tahun 2025 hanya mencapai 73,58 persen dari pagu Rp1.379,12 miliar (capaian terendah dalam lima tahun terakhir). Rendahnya serapan ini terutama disebabkan oleh kompleksitas dan lamanya proses pengadaan lahan untuk berbagai proyek infrastruktur kota, termasuk perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan simpang jalan, serta proses administrasi yang melibatkan sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DKI Jakarta. Penyusutan porsi Belanja Modal secara konsisten mengindikasikan bahwa kapasitas investasi pembangunan fisik daerah semakin tergerus oleh meningkatnya beban belanja operasi yang bersifat rutin dan mengikat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan belanja pada P-RKPD Tahun 2026 agar akselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) mencerminkan fleksibilitas fiskal daerah dalam merespons keadaan darurat dan kejadian luar biasa. Pada tahun 2021, realisasi BTT masih relatif tinggi di angka Rp311,55 miliar, merupakan sisa dampak penanganan COVID-19 yang masih memerlukan belanja darurat. Sejak tahun 2022 hingga 2025, realisasi BTT turun drastis ke kisaran Rp3,70 miliar hingga Rp21,54 miliar, mencerminkan normalnya kondisi dan tidak adanya bencana skala besar di Kota Bekasi selama periode tersebut. Pada tahun 2025, BTT hanya terealisasi Rp18,38 miliar atau 44,06 persen dari pagu Rp41,72 miliar, penyerapan yang rendah namun wajar mengingat sifat belanja ini yang memang hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan komponen yang relatif baru dan nilainya berfluktuatif. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi Belanja Transfer masing-masing sebesar Rp1,00 miliar dan Rp50,00 miliar. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi Rp105,34 miliar yang sepenuhnya terserap 100 persen, komponen ini mencerminkan Bantuan Keuangan kepada pihak lain yang telah ditetapkan dan bersifat mengikat. Pada tahun 2025, tidak terdapat realisasi Belanja Transfer.

Secara keseluruhan, kinerja Belanja Daerah Kota Bekasi selama 2021–2025 mencerminkan dua kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi, penyerapan belanja yang stabil di kisaran 85–89 persen menunjukkan adanya disiplin fiskal yang terkelola. Di sisi lain, meningkatnya dominasi belanja operasi yang bersifat konsumtif disertai penyusutan berkelanjutan proporsi belanja

modal, mengindikasikan berkurangnya ruang fiskal untuk investasi pembangunan yang produktif dan berdampak jangka panjang. Tren ini menjadi catatan serius dalam penyusunan kebijakan belanja tahun 2027, di mana penguatan alokasi belanja modal dan efisiensi belanja operasi harus menjadi komitmen yang terukur dan terlaksana.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri; Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya; Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya; Pemberian Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan komponen APBD yang berfungsi menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja daerah. Struktur pembiayaan Kota Bekasi selama periode 2021–2025 didominasi oleh penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan terutama dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja realisasi pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan tingkat yang sangat tinggi dan konsisten (berkisar antara 95 hingga 100 persen) mencerminkan bahwa pelaksanaan pembiayaan relatif sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Sumber tunggal penerimaan pembiayaan Kota Bekasi selama periode 2021–2025 adalah penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Tidak terdapat penerimaan dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun penerimaan pinjaman daerah dalam periode ini, sebuah kondisi yang mencerminkan kehati-hatian Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga posisi utang daerah yang bersih.

Nilai SiLPA yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan menunjukkan tren yang menarik untuk dicermati. Nilainya meningkat dari Rp776,52 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp893,70 miliar pada tahun 2023, kemudian menurun tajam ke Rp591,84 miliar pada tahun 2024, dan berlanjut turun ke Rp358,85 miliar pada tahun 2025. Penurunan SiLPA yang digunakan ini sesungguhnya tidak selalu merupakan sinyal negatif. Justru sebaliknya, penurunan SiLPA mencerminkan perbaikan dalam kualitas penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, artinya semakin sedikit anggaran yang tersisa tidak terserap di akhir tahun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Namun demikian, penurunan SiLPA yang signifikan dari Rp893,70 miliar (penerimaan 2023) menjadi Rp358,85 miliar (penerimaan 2025) juga berarti berkurangnya bantalan fiskal yang tersedia untuk menutup defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa Kota Bekasi semakin tidak dapat mengandalkan SiLPA sebagai sumber utama pembiayaan defisit, dan mendorong perlunya peningkatan kemampuan penghimpunan PAD secara riil serta efisiensi belanja yang lebih terukur.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kota Bekasi selama periode 2021–2025 terdiri dari penyertaan modal daerah kepada BUMD, investasi non-permanen, dan pembentukan dana cadangan. Penyertaan modal menjadi komponen pengeluaran pembiayaan yang paling dominan dan konsisten hadir di setiap tahun anggaran.

Pada tahun 2021, pengeluaran pembiayaan hanya sebesar Rp12,60 miliar (sangat rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya) karena penyertaan modal masih sangat terbatas dalam periode pemulihan pascapandemi. Pengeluaran pembiayaan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp75,88 miliar, di mana selain penyertaan modal sebesar Rp45,88 miliar, juga terdapat pembentukan dana cadangan sebesar Rp30,00 miliar. Pembentukan dana cadangan berlanjut pada tahun 2023 sebesar Rp37,47 miliar, sehingga total pengeluaran pembiayaan mencapai Rp99,97 miliar, tertinggi selama periode 2021–2025. Dana cadangan yang dibentuk pada 2022–2023 ini dialokasikan untuk mendukung kebutuhan belanja yang bersifat strategis dan terencana dalam jangka menengah.

Pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan kembali menyederhanakan strukturnya menjadi hanya penyertaan modal sebesar Rp43,00 miliar. Sementara pada tahun 2025, penyertaan modal meningkat menjadi Rp57,50 miliar dan terealisasi 100 persen sesuai target, menunjukkan komitmen yang terencana dalam memperkuat kapasitas BUMD sebagai salah satu sumber PAD di masa mendatang.

3. Pembiayaan Neto dan SiLPA

Pembiayaan Neto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan) mencerminkan kemampuan pembiayaan daerah dalam menutup defisit anggaran. Nilai Pembiayaan Neto menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2023: dari Rp793,73 miliar (2023) menjadi Rp548,84 miliar (2024) dan Rp301,35 miliar (2025). Penurunan ini merupakan akibat langsung dari menyusutnya SiLPA yang tersedia sekaligus meningkatnya pengeluaran pembiayaan. Meskipun nilai Pembiayaan Neto yang lebih rendah mencerminkan berkurangnya ketergantungan pada sumber pembiayaan lama, hal ini juga mensyaratkan bahwa defisit anggaran di tahun mendatang harus dapat ditutup oleh sumber yang lebih terencana dan terstruktur.

Secara keseluruhan, kinerja pembiayaan daerah Kota Bekasi selama 2021–2025 tergolong sangat baik dari sisi realisasi. Namun yang lebih penting untuk dicermati adalah perubahan struktural yang terjadi: ketergantungan pada SiLPA sebagai sumber pembiayaan semakin berkurang, dan ruang fiskal yang tersedia untuk menutup defisit semakin menyempit. Kondisi ini menuntut perencanaan yang lebih cermat dalam penetapan defisit dan sumber pembiayaannya pada P-RKPD Tahun 2026, serta menjadi dorongan kuat untuk mempercepat peningkatan kinerja PAD agar kapasitas fiskal daerah dapat tumbuh dari sumber yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

PROYEKSI KEUANGAN KOTA BEKASI

Kinerja pelaksanaan APBD merupakan basis empiris yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk tahun rencana. Kinerja APBD selama lima tahun terakhir mencerminkan kapasitas

fiskal riil Kota Bekasi, pola penghimpunan pendapatan, kualitas penyerapan belanja, serta kemampuan daerah dalam mengelola pembiayaan secara *prudent*. Selain mencermati kinerja pelaksanaan PABD, pada proyeksi yang dilakukan juga mempertimbangkan regulasi dan kebijakan terbaru serta dinamika yang berkembang.

Pada proyeksi pendapatan telah mempertimbangkan perubahan regulasi desentralisasi fiskal yang baru dan telah memasukkan pajak opsen PKB dan BBNKB sebagai bagian dari PAD. Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan beberapa jenis penerimaan retribusi yang dihapus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
3. Retribusi pelayanan terminal, termasuk (a) Retribusi pelayanan penyediaan parkir di terminal, (b) retribusi tempat kegiatan usaha di terminal, dan (c) retribusi penyediaan fasilitas lainnya di terminal
4. Retribusi ijin trayek

Proyeksi belanja daerah Kota Bekasi dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi dalam tahun periode yang sama, dan kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, target/proyeksi belanja Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah.

Belanja Daerah pada P-RKPD Tahun 2026, difokuskan pada belanja dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang menunjang sektor kesehatan dan perekonomian terutama juga dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti pemenuhan Standar Pelayanan Umum (SPM), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, penurunan tingkat pengangguran dan menjaga tingkat inflasi.

Belanja Daerah Kota Bekasi dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Proyeksi belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, belanja daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi.

Pada tahun 2026, terdapat kegiatan skala regional yang harus dipertimbangkan dalam belanja daerah. Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.259-Kesra/2024 yang menetapkan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 serta kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor /Kep.36-Kesra/2025 tentang Penunjukan Tuan Rumah Bersama Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat XV Tahun 2026 menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu dari tuan

rumah Bersama penyelenggaraan PORPROV XV tahun 2026. Kegiatan PORPROV XV direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November 2026 sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2563/KO.05.02/DISPORA tanggal 9 April 2025. Berdasarkan hal ini, maka proyeksi belanja daerah Kota Bekasi juga harus dapat mengakomodasi pelaksanaan kegiatan PORPROV XV Jawa Barat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah:

1. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan. analisis portofolio. dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut
2. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD
3. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah
4. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah
5. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD
6. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan. sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD dan menambah sumber pendapatan daerah.
Selain mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dinamika pergeseran APBD TA 2026 yang telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan proyeksi keuangan pada P-RKPD Kota Bekasi Tahun 2026. Dinamika pergeseran APBD TA 2026 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pergeseran 1 tertuang dalam Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.1.4/020-BA.TAPD/BPKAD tanggal 28 Januari 2026
   - Terdapat penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah berupa penambahan pagu anggaran sebesar Rp19.143.037.000,-
   - Penambahan pagu tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp3.815.221.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp15.327.816.000,-
2. Pergeseran 2 tertuang dalam Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.1.4/020-BA.TAPD/BPKAD tanggal Januari 2026
   - Terdapat penambahan pagu pada Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp10.276.738.386,- yang semula sebesar Rp373.436.959.182,- menjadi sebesar Rp383.436.959.182,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengurangan pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp287.081.424,-
b. Penambahan pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.563.819.819,-

- Terdapat kebutuhan anggaran untuk penyelesaian pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang belum dibayarkan sebesar Rp105.437.951.498,-

3. Pergeseran 3 tertuang dalam Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.3.3/049-BA.TAPD/BPKAD tanggal 3 Maret 2026
   - Adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2026 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp189.878.341.000,-
   - Terdapat kebutuhan anggaran untuk penyelesaian pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang belum dibayarkan sebesar Rp92.077.492.509,-
4. Pergeseran 4 tertuang dalam Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.3.3/102-BA.TAPD/BPKAD tanggal 12 Mei 2026
   - Adanya penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kebutuhan mendesak untuk penanganan infrastruktur jalan, drainase dan sekolah di Kota Bekasi melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
   - Adanya penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan berupa pengurangan pagu anggaran belanja yang selanjutnya dialokasikan untuk penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga guna memenuhi pendanaan atas kondisi mendesak dalam rangka pengadaan lahan pembangunan Flyover Bulak Kapal Tahun Anggaran 2026
5. Pergeseran 5 tertuang dalam Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.3.3/106-BA.TAPD/BPKAD tanggal 13 Mei 2026
   - Adanya penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kebutuhan mendesak dalam rangka pengadaan lahan pembangunan Flyover Bulak Kapal sebesar Rp60.450.000.000,-
   - Terdapat pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek yang sama sehingga dilakukan penyesuaian belanja berdasarkan usulan kepala perangkat daerah

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA BEKASI

A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bekasi Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal secara berkelanjutan melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan transfer.

Penguatan PAD menjadi prioritas mengingat rata-rata derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bekasi terhadap transfer pusat masih berada pada kategori Sangat Tinggi, yakni di atas 50 persen dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya diskresi fiskal daerah dalam mendanai prioritas pembangunan secara mandiri.

Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada P-RKPD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,256 triliun, meningkat dari proyeksi APBD TA 2026 yang sebesar Rp6,687 triliun. Komponen PAD ditargetkan meningkat sekitar Rp6 miliar dari target PAD pada APBD TA 2026 yang sebesar Rp4,002 triliun. Peningkatan PAD ini bertumpu pada optimalisasi empat komponen utamanya, yaitu pajak daerah yang ditargetkan Rp3,423 triliun, retribusi daerah Rp522 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp22,758 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp40,092 miliar.

Strategi peningkatan PAD pada tahun 2026 dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, intensifikasi pendapatan daerah, yang mencakup penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi untuk meminimalkan potensi kebocoran (*potential loss*); pembaruan dan pemeliharaan basis data objek dan subjek pajak secara berkala dengan melibatkan unit teknis dan kecamatan; serta penagihan piutang pajak secara aktif melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Fokus intensifikasi diarahkan pada pos pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara historis menjadi kontributor terbesar pajak daerah.

Kedua, ekstensifikasi pendapatan daerah, yang dilakukan melalui pendataan objek dan subjek pajak baru; perluasan kerja sama dengan institusi keuangan dan sektor swasta dalam rangka penerimaan pajak dan retribusi; serta peningkatan pelayanan retribusi pasar melalui sistem pembayaran digital untuk mengoptimalkan penerimaan dan menekan kebocoran. Selain itu, peningkatan kinerja BUMD juga menjadi salah satu strategi memperkuat komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk melalui penguatan tata kelola dan ekspansi usaha Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah yang ada.

Terkait pendapatan transfer, proyeksi transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah pada P-RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,248 triliun, meningkat jika dibandingkan proyeksi APBD TA 2026 yang sebesar Rp2,684 triliun. Penyesuaian ini tentunya mencerminkan kehati-hatian dalam memproyeksikan komponen transfer yang bersifat spesifik seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

B. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi pada P-RKPD Tahun 2026 dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Belanja daerah disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang mencerminkan kapasitas riil fiskal, dengan tetap mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sebelum mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas pembangunan.

Penentuan prioritas alokasi belanja daerah dikelompokkan menjadi dua lapis. Prioritas pertama dialokasikan untuk belanja yang bersifat mengikat termasuk belanja pegawai, belanja operasional yang wajib, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Dalam kerangka keselarasan dengan kebijakan nasional, alokasi belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2026 juga memperhatikan dua prioritas *mandatory spending* yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, alokasi belanja di bidang pendidikan yang diprioritaskan untuk pemenuhan SPM pendidikan, pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun, pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta revitalisasi pendidikan vokasi. Kedua, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 147 ditetapkan paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah lainnya. Alokasi infrastruktur ini diarahkan pada penguatan tata kelola air minum dan sanitasi, peningkatan konektivitas jalan, pengendalian banjir, serta penyediaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Secara substantif, arah kebijakan belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2026 difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, peningkatan infrastruktur dasar. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata. Ketiga, peningkatan literasi digital dan ekosistem kreatif untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Keempat, peningkatan kemudahan investasi, dan kelima, penguatan tata kelola pemerintahan lini terdepan.

Di samping itu, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, meliputi penurunan prevalensi stunting menuju target 8,5 persen pada tahun 2026, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Indikator penyerapan belanja daerah pada tahun 2026 ditargetkan minimal sebesar 86,7 persen dari total pagu, mencerminkan komitmen terhadap kualitas pelaksanaan anggaran yang tidak hanya efisien namun juga tepat sasaran.

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Bekasi pada P-RKPD Tahun 2026 ditujukan untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja daerah, serta memastikan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan dilakukan secara *prudent* dan bertanggung jawab. Pada sisi penerimaan pembiayaan, sumber utamanya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp431 miliar. Meskipun adanya SiLPA merupakan cerminan dari belum optimalnya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya, besaran SiLPA yang terencana ini dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit anggaran di tahun berjalan. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan

pada SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah Kota Bekasi pada P-RKPD Tahun 2026 berpegang pada prinsip keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, dengan menjadikan peningkatan kemandirian daerah dan kualitas pelayanan publik sebagai muara dari seluruh kebijakan pengelolaan keuangan yang ditempuh.

PENDANAAN NON APBD
Selain pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, pelaksanaan pembangunan di kota ini juga didukung dengan pendanaan yang bersumber dari non APBD. Pendanaan non APBD meliputi pendanaan dari swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sektor swasta di Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung pembangunan kota, baik secara langsung melalui investasi maupun tidak langsung melalui kemitraan dan program tanggung jawab sosial. Bentuk investasi langsung dalam mendukung pembangunan kota seperti pembangunan pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, fasilitas wisata, dan lainnya. Bentuk pembangunan seperti ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik kota yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian kota.
Pendanaan lain dalam pembangunan Kota Bekasi yaitu bersumber dari PKBL dan TJSL. PKBL dan TJSL di Kota Bekasi tahun 2021-2024 yang tercatat baru berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Mencermati masih minimnya pendanaan yang bersumber dari PKBL dan TJSL di atas, diperlukan upaya terobosan peningkatan pendanaan dan perluasan mitra. Hal ini penting untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemanfaatannya dapat diarahkan untuk membantu menangani persoalan yang menjadi fokus perhatian misalnya terkait penanganan stunting, kemiskinan, penataan PKL, estetika kota, dan lainnya.
Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023).
Bentuk kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan tepat guna, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Proyek KPBU adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

Beberapa KPBU yang telah dan direncanakan akan dilaksanakan di Kota Bekasi, antara lain:

- KPBU SPAM Regional Jatiluhur I

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya menggunakan skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur air minum curah (AMC). Proyek dengan kapasitas 4.750 l/d (liter per detik) ini melayani Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta. Pembangunan proyek yang dimulai pada akhir tahun 2021, saat ini telah selesai dikerjakan.

- KPBU Ducting

KPBU ini merupakan kerja sama berupa pembangunan ducting dan menara telekomunikasi di ruas jalan Kota Bekasi. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merapikan tampilan kabel-kabel utilitas, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta mendukung penerapan Bekasi Smart City. Pengerjaan proyek ini dilaksanakan diruas jalan Kota Bekasi dengan panjang jalur saluran ducting sepanjang 608.673 meter dan pembangunan sebanyak 373 Menara Telekomunikasi Seluler (Mikro Seluler/Microcell Pole (MCP)) di jalur jalan Kota Bekasi. Untuk ke depannya, KPBU Ducting ini direncanakan akan dilakukan kembali di beberapa ruas yang ada di Kota Bekasi.

- KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

KPBU pengelolaan sampah di Kota Bekasi mengacu pada upaya pemerintah kota untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun dan mengelola fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan menghasilkan energi terbarukan. Tahap yang sedang dilakukan yaitu permohonan dukungan yang ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain dari sumber pendanaan di atas, terdapat beberapa alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan, misalnya:

1. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik. Pinjaman ini dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Namun demikian, dalam prosesnya memerlukan persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

2. Obligasi Daerah

Obligasi daerah adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks kota, obligasi daerah kota diterbitkan oleh pemerintah kota untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di wilayah kota tersebut.

Tujuan penerbitan obligasi ini yaitu untuk membiayai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, obligasi dapat mendukung program-program pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat kota. Obligasi ini juga merupakan bentuk diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

3. Zakat dan Wakaf

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembangunan daerah berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara teori, zakat adalah salah satu instrumen utama dalam redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks pembangunan daerah, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Pada tahun 2026, dunia berada di persimpangan yang penuh tantangan dan peluang strategis. Dinamika global tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi semata, melainkan juga oleh transformasi teknologi, krisis iklim, ketegangan geopolitik yang meningkat, serta ketimpangan sosial yang makin mencolok. Di tengah dunia yang semakin saling terhubung, aktor-aktor negara maupun non-negara dituntut untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

a) Ketegangan Geopolitik dan Multipolaritas Baru. Salah satu isu utama yang mendominasi lanskap strategis global adalah perubahan tatanan geopolitik dari unipolaritas pasca-Perang Dingin menuju multipolaritas. Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, India, dan kekuatan regional lainnya memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk kebijakan global. Di tahun 2026, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok diperkirakan akan tetap menjadi poros utama geopolitik dunia. Persaingan ini tidak hanya terbatas pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah teknologi (seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan ruang angkasa), diplomasi digital, dan pengaruh budaya. Sementara itu, perang yang berlangsung sejak 2022 antara Rusia dan Ukraina masih berdampak besar terhadap stabilitas Eropa dan hubungan internasional. Uni Eropa, meski relatif solid, menghadapi tekanan politik internal yang muncul dari meningkatnya populisme dan krisis energi yang belum sepenuhnya terselesaikan
b) Krisis Iklim dan Perubahan Lingkungan. Perubahan iklim tetap menjadi isu strategis yang mendesak dan lintas batas negara. Tahun 2026 diprediksi menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah, dengan kejadian cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir besar, dan kebakaran hutan yang makin sering terjadi. Negara-negara di *Global South* menjadi yang paling terdampak, meskipun kontribusi emisi mereka secara historis lebih kecil dibanding negara-negara maju. Konferensi iklim global yang diadakan setiap tahun kini berfokus pada implementasi nyata dari janji pengurangan emisi karbon, transisi energi bersih, dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan aksi nyata. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidrogen hijau, serta diplomasi iklim akan menjadi faktor strategis yang menentukan posisi dan reputasi negara-negara di panggung global.
c) Transformasi Teknologi dan Tantangan Etika. Percepatan adopsi teknologi disruptif yang mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik juga diperkirakan akan berjalan dalam jangka pendek. Kecerdasan buatan generatif, *Internet of Things* (IoT), teknologi kuantum, dan bioteknologi menjadi sektor-sektor kunci yang tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membawa risiko serius. Persoalan keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi disinformasi akibat teknologi *deepfake* dan AI akan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara dan

masyarakat sipil. Perlu regulasi global yang tidak hanya mengatur penggunaan teknologi ini, tetapi juga melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

d) Ketimpangan Ekonomi dan Mobilisasi Sosial. Ketimpangan ekonomi global semakin mencolok pada 2026 karena didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang tidak merata, inflasi global, dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pangan dan energi. Negara-negara berkembang menghadapi beban utang yang berat, sedangkan negara maju cenderung mempertahankan dominasi dalam rantai nilai global dan kepemilikan teknologi. Ketimpangan ini juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital. Akibatnya, gerakan sosial dan protes rakyat yang menuntut keadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan semakin meningkat. Tuntutan akan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, seperti pengenaan pajak kekayaan global dan perlindungan pekerja digital, akan menjadi bagian penting dari diskusi kebijakan publik global.
e) Kesehatan Global dan Ancaman Pandemi Baru. Pandemi COVID-19 telah meninggalkan warisan penting dalam sistem kesehatan global. Pada 2026, meskipun dunia lebih siap dalam menghadapi wabah, ancaman pandemi baru masih menghantui. Perubahan iklim dan deforestasi meningkatkan risiko *zoonosis* (penularan penyakit dari hewan ke manusia), sementara mobilitas manusia yang tinggi mempercepat penyebaran penyakit. Isu strategis di bidang ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, distribusi vaksin yang adil, dan pendanaan untuk riset medis lintas negara. WHO dan lembaga-lembaga kesehatan global lainnya dituntut untuk lebih tanggap dan transparan dalam menangani potensi krisis kesehatan di masa depan.

Selain isu global, beberapa isu nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Beberapa isu nasional yang akan timbul atau masih terus menghangat diuraikan dibawah ini.

a) Transformasi Ekonomi dan Tantangan Produktivitas. Pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5–5,5 persen, kualitas pertumbuhan menjadi sorotan. Pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif dan belum cukup kuat untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu isu utama pembangunan Indonesia adalah stagnasi produktivitas sektor-sektor utama, terutama pertanian dan manufaktur. Industri manufaktur masih menghadapi tantangan dari sisi daya saing, adopsi teknologi, dan ketergantungan pada bahan baku impor. Di sisi lain, sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja dengan kontribusi lebih dari 55%, yang menyebabkan rendahnya jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi jutaan pekerja. Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan energi, menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, dan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri.
b) Kontinuitas Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan IKN merupakan salah satu isu penting di Indonesia. Pemerintah menargetkan pemindahan sebagian pusat pemerintahan

akan dilakukan pada tahun 2026, termasuk beberapa kementerian dan lembaga negara. Pembangunan IKN membawa harapan pemerataan pembangunan, namun juga memunculkan berbagai tantangan. Pertama, isu keberlanjutan lingkungan menjadi sorotan. Pembangunan kota pintar dan hijau harus memperhatikan keseimbangan ekosistem Kalimantan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kedua, pembiayaan proyek IKN sebagian besar mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang menuntut efektivitas dalam manajemen proyek dan kepercayaan investor. Kedua, Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi transformasi cara berpikir pembangunan kota yang berorientasi masa depan. Oleh karena itu, IKN akan menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan yang akan diuji efektivitasnya pada tahun 2026.

c) Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Indonesia tengah mengalami bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif sangat tinggi. Namun, potensi ini bisa menjadi beban apabila tidak diiringi dengan kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai. Tahun 2026 menjadi periode penting dalam memastikan sistem pendidikan mampu menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya capaian literasi dan numerasi di berbagai daerah, serta ketimpangan kualitas antara sekolah di kota dan desa. Kurikulum Merdeka, yang telah diperkenalkan sebelumnya, masih dalam proses evaluasi dan adaptasi. Tantangan lainnya adalah digitalisasi pendidikan yang belum merata dan pelatihan guru yang belum optimal. Di sisi lain, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor teknologi, energi baru dan terbarukan, serta manufaktur cerdas. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi kunci untuk menghasilkan tenaga kerja yang relevan dan kompeten.

d) Infrastruktur dan Konektivitas. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Jalan tol, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur digital menjadi fokus utama. Tahun 2026 menjadi momen evaluasi sejauh mana proyek-proyek infrastruktur yang telah dicanangkan memberikan dampak nyata terhadap konektivitas dan distribusi ekonomi antarwilayah. Pada sisi lain, tantangan besar masih terjadi, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, keberlanjutan finansial proyek-proyek KPBU, serta kapasitas teknis di daerah. Di beberapa wilayah, pembangunan infrastruktur belum disertai dengan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, sehingga potensi infrastruktur belum dimanfaatkan secara optimal. Isu pemerataan pembangunan wilayah timur Indonesia dan kawasan perbatasan juga masih menjadi perhatian. Keberadaan infrastruktur harus mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

e) Lingkungan dan Perubahan Iklim. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dan penghasil emisi karbon cukup besar, menghadapi tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan. Tahun 2026 menjadi titik krusial dalam upaya pencapaian target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana diklaim oleh pemerintah. Namun, realisasi transisi energi masih menghadapi tantangan dari sisi

investasi, kesiapan teknologi, dan kepentingan politik. Penggunaan batu bara masih tinggi dalam bauran energi nasional, sementara adopsi energi terbarukan belum melampaui 15%. Selain itu, deforestasi, degradasi lahan gambut, dan kebakaran hutan masih menjadi isu utama, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Implementasi program FOLU Net Sink 2030 (*Forestry and Other Land Use*) harus dipercepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan sangat penting. Program-program seperti pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus diperkuat.

f) Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Layanan Publik. Tahun 2026 juga merupakan tahun penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan. Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah diterapkan di berbagai instansi, namun pelaksanaannya masih belum merata. Isu korupsi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan serius. Reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi harus terus dilanjutkan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan harus diperkuat. Transparansi anggaran, akses data publik, dan keterlibatan masyarakat sipil akan menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola di era digital.

Pada konteks regional Jawa Barat, terdapat beberapa isu yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Kota Bekasi, sebagai bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), memainkan peran strategis dalam pembangunan regional Jawa Barat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta membuat Bekasi menjadi salah satu kota penyangga utama ibu kota negara. Seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, Kota Bekasi menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari tekanan infrastruktur, tata ruang, hingga kesejahteraan masyarakat.

a) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Perkembangan penduduk menciptakan sumber daya manusia yang perlu disiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan norma sosial-budaya masyarakat.
b) Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai *green* dan *blue economy* serta pembangunan inklusif diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan serta belum optimalnya penerapan *green* dan *blue economy*.
c) Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan. Pemerataan dan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Kesenjangan ekonomi antarwilayah kabupaten/kota dan ketimpangan antara jalur

Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan masih menjadi permasalahan di Jawa Barat.

d) Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2024. Meskipun capaian sudah tinggi, permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan pelayanan publik untuk mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpadu, adaptif, responsif, dan akuntabel.

Mempertimbangkan berbagai isu sesuai konteks (global, nasional, dan regional) seperti yang telah diuraikan di atas, isu strategis yang akan dihadapi Kota Bekasi sepanjang tahun 2026, seperti pada gambar dibawah ini.

a) Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar. Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 2,5 juta jiwa pada tahun 2025, kepadatan yang tinggi telah menimbulkan tekanan besar terhadap ruang kota, perumahan, transportasi, dan layanan dasar di Kota Bekasi. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang matang menyebabkan terjadinya *urban sprawl*, alih fungsi lahan, serta munculnya kawasan kumuh. Tahun 2026 menjadi titik penting untuk menata kembali arah pengembangan kota agar lebih berorientasi pada prinsip *compact city*, dengan pengembangan kawasan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD), integrasi permukiman dan transportasi publik, serta pelestarian ruang terbuka hijau. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bekasi sering mengalami banjir akibat buruknya sistem drainase, sedimentasi sungai, serta minimnya ruang hijau. Sungai-sungai utama seperti Kali Bekasi kerap tercemar oleh limbah rumah tangga dan industri. Tantangan lingkungan ini tidak dapat diselesaikan oleh Kota Bekasi sendiri.
b) Akses Pendidikan dan Kesehatan. Kota Bekasi menghadapi tantangan sosial yang signifikan, seperti ketimpangan akses layanan publik. Meskipun secara makro pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kesenjangan antarwilayah dan antarpenduduk masih terlihat jelas, terutama di wilayah pinggiran yang minim akses transportasi dan fasilitas umum. Dalam konteks Jawa Barat, Kota Bekasi menjadi gambaran nyata bagaimana pertumbuhan kota besar tidak selalu menjamin kesejahteraan warganya. Dibutuhkan pendekatan pembangunan sosial berbasis komunitas, penguatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan). Program perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan akan menjadi tantangan dan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan migrasi penduduk yang tinggi.
c) Literasi Digital dan Ekosistem Kreatif. Kota Bekasi yang berkembang menjadi pusat jasa, perdagangan dan hunian berperan signifikan dalam mendukung pelaku industri di Kawasan sekitar Kota Bekasi. Hanya saja perkembangan di Kota Bekasi masih belum bersifat inklusif. Hal ini dapat diihat dari masih adanya penduduk lokal yang belum menikmati manfaat langsung dari pertumbuhan tersebut karena keterbatasan akses

pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja formal. Diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang mampu mengintegrasikan Kota Bekasi sebagai simpul jasa dan inovasi dari kawasan industri sekitarnya. Pemerintah Kota Bekasi perlu memperkuat sektor UMKM, mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Transformasi digital menjadi bagian penting dari pembangunan kota modern yang selaras dengan pembangunan *smart city*.

d) Kemudahan Investasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi yang cukup besar merupakan sebuah potensi bagi peningkatan daya tarik investasi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan serta permukimam. Keberadaan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan transportasi umum, dapat berpotensi memperkuat daya tarik Bekasi sebagai lokasi strategis bagi investor. Jika didukung dengan perizinan yang mudah dan kebijakan pro-investasi, Kota Bekasi berpotensi menjadi pusat ekonomi regional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Selain itu, perlu untuk dapat menguatkan kebijakan agar investor yang melakukan kerja sama di Kota Bekasi bersedia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal agar kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat.

e) Tata Kelola Pemerintahan Lini Terdepan. Pembangunan Kota Bekasi tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat, akuntabel, dan sinergis dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah Kota Bekasi juga perlu memperkuat *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik, sistem pengaduan masyarakat, pengawasan pembangunan, serta manajemen transportasi. Inisiasi *smart governance* yang berfokus pada efisiensi, keterbukaan data, dan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi perlu segera didorong di Kota Bekasi. Selain itu, tata kelola pemerintahan lini terdepan akan menjadi tantangan tersendiri karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.2.1 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, sasaran pembangunan nasional tahun 2026, mencakup 3 (tiga) pilar utama pembangunan nasional yang disebut dengan Trisula Pembangunan. Ketiga pilar tersebut, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan target indikator sebagai berikut:
   - Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 – 6,3 persen;
   - *Gross National Income* (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto Per kapita sebesar 5.870 US$;
   - Penurunan Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 37,14 persen;
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 76,67 poin.
2. Penurunan kemiskinan, dengan target indikator:
   - Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen
   - Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,0 persen.
   - Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,44-4,96 persen;
   - Rasio Gini 0,377-0,380.

3. Sumber Daya Manusia Berkualitas, dengan target indikator:
   - Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai nilai 0,57.

4.2.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, seperti pada tabel di berikut. Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

4.2.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera", dan visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

   Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan, administrasi pemerintahan (kependudukan dan perijinan) serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan

   Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudipekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
3) Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

   Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas,

inovasi. serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

4) Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat
   Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.
5) Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren
   Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 tujuan dan 19 sasaran. Ketercapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi ditunjukkan dengan indikator dan target yang dijelaskan seperti pada tabel berikut. KETERKAITAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT, DAN KOTA BEKASI

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka Kota Bekasi berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapai sasaran nasional dan Provinsi Jawa Barat. Keselarasan pertama yang perlu dijaga yaitu terkait dengan Trisula Pembangunan dalam RKP 2026 yang terdiri dari tiga pilar utama strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keselarasan Trisula Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi Tahun 2026 seperti pada tabel di bawah ini.

Untuk keselarasan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2025, serangkaian arah kebijakan telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2026. Rangkaian arah kebijakan tersebut, ditampilkan pada tabel berikut.

4.3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Pada konteks Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dijabarkan pada tabel berikut.

4.3.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 seperti pada tabel dibawah ini.

4.4 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.4.1 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Tema RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Sebagai penjabaran dari dari tema RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, RKP Tahun 2026 menjadi perencanaan pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP Tahun 2026 menekankan pada dua kata kunci penting yaitu pertama adalah pangan dan energi, serta kedua adalah ekonomi yang produktif dan inklusif.

Kata kunci pertama yaitu pangan dan energi merupakan perwujudan dari pelaksanaan Prioritas Nasional 2 RPJM, yaitu mewujudkan swasembada pangan, energi dan air. Langkah-langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui beberapa prioritas antara lain optimalisasi BULOG (Badan Urusan Logistik), pelaksanaan *food estate*, peningkatan bauran *ethanol* dan biodiesel, pengembangan energi terbarukan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dan pengelolaan sampah terpadu.

Kata kunci kedua yaitu adalah ekonomi yang produktif dan inklusif, menjadi bagian dari perwujudan Prioritas Nasional 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Beberapa pokok kebijakan yang didorong antara lain adalah: (1) Pendidikan dan Kesehatan melalui: ekosistem makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, digitalisasi Pendidikan, pemeriksanaan Kesehatan, dan percepatan rumah sakit daerah; (2) Adaptasi teknologi dan inovasi melalui: transformasi digital serta riset dan inovasi; (3) Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui: percepatan hilirisasi sumber daya alam oleh entitas milik Indonesia dan optimalisasi potensi Danantara; (4) Deregulasi dan Kepastian Hukum melalui: reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, dan ketertarikan investasi; (5) Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui: data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, 3 juta rumah, koperasi desa/kelurahan Merah Putih; (6) Pertahanan Semesta melalui: komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan territorial; dan (7) Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkanlah prioritas nasional. Prioritas nasional ini dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas utama sebagaimana termuat dalam (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Prioritas nasional dan kegiatan prioritas utama seperti pada tabel di bawah ini.

4.4.2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 mengusung tema pembangunan "Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar dan Konektivitas Darat". Tema ini memiliki makna bahwa aksesibilitas layanan dasar dan konektivitas daerah perlu merata dengan tujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata Kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi.

Untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 diuraikan seperti pada tabel berikut.

4.4.3 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 mengusung tema "Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian". Tema pembangunan ini menekankan pada tiga hal utama yaitu ketahanan kota, kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan, serta kemantapan perekonomian. Tema ini juga sejalan dengan penahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada akses infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan, literasi digital dan ekosistem kreatif, kemudahan investasi, dan tata kelola pemerintahan.

Priorotas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026 disusun berdasarkan penahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Selain itu, prioritas pembangunan ini juga disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu:

1. Tematik, disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan
2. Holistik, menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir
3. Integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan
4. Spasial, mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan

4.4.4 KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka Kota Bekasi berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapai prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

4.5 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI TAHUN 2026

Program prioritas Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta diselaraskan dengan tema dan prioritas pembangunan. Program prioritas tersebut seperti pada tabel dibawah ini.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KOTA BEKASI

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan kumpulan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah di Kota Bekasi. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah ini untuk mencapai kinerja pembangunan daerah tahun 2026 dan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan tahunan daerah dengan pembangunan jangka menengah daerah. Rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tingkat Perangkat Daerah, rencana pagu anggaran Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

RENCANA PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN

RENCANA PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS KOTA BEKASI

Program prioritas pembangunan di Kota Bekasi pada dasarnya adalah pengutamaan dari program-program yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi yang termuat dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 serta merupakan janji politik dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Keterkaitan dari berbagai program prioritas Kota Bekasi dengan program unggulan Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut. Sementara keterkaitan program prioritas dengan prioritas pembangunan dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel 5.3.

RENCANA PROGRAM DUKUNGAN KOTA BEKASI TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA

Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Bekasi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Jabar Istimewa dijabarkan pada tabel berikut.

RENCANA PROGRAM DUKUNGAN KOTA BEKASI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Kota Bekasi Tahun 2026 terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada gambar di bawah ini.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kota Bekasi Tahun 2026 seperti pada tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Bekasi Tahun 2026 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 ini adalah penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, sebuah tonggak yang penting, karena tahun kedua adalah tahun di mana fondasi yang diletakkan di awal periode mulai diuji oleh realitas pelaksanaan. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 memiliki kedudukan yang strategis dan multidimensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara substansial, Perubahan RKPD memuat seluruh arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, dan Perangkat Daerah penanggungjawabnya. Secara normatif, ia menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama DPRD sebagai fondasi Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Secara operasional, ia menjadi kompas bagi setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan secara faktual, ia adalah tolok ukur yang jujur untuk menilai sejauh mana pemerintah kota berhasil merealisasikan janjinya kepada warga.

Keberhasilan dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 pada akhirnya ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih penting dari kualitas dokumennya yaitu kualitas pelaksanaannya. Pelaksanaan yang baik membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan administratif. Ini membutuhkan sinergi yang harmonis antara seluruh Perangkat Daerah, koordinasi yang erat yang dikawal oleh Bapperida, serta keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar objek dari program yang dirancang, melainkan subjek yang ikut merancang, mengawasi, dan merasakan hasilnya.

Bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 ini adalah amanah. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang di dalamnya adalah komitmen yang harus diwujudkan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan orientasi pada hasil yang nyata. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun juga harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang dijaring melalui forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku, bukan sekadar formalitas perencanaan yang dijalankan karena prosedur mengharuskannya. Setiap rupiah anggaran yang dikelola adalah uang rakyat dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang dirasakan, infrastruktur yang digunakan, dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Bagi masyarakat Kota Bekasi, dokumen ini adalah milik bersama. Undang-Undang memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan dalam pengawasan pembangunan. Partisipasi itu bukan hak yang perlu diminta, melainkan hak yang memang sudah seharusnya digunakan. Kota yang baik tidak dibangun oleh pemerintahnya seorang diri tetapi dibangun bersama oleh pemerintah dan warganya, dalam kepercayaan yang saling dijaga.

Fokus pembangunan Kota Bekasi di tahun 2026 adalah "Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian". Tema ini bukan sekadar

tagline tetapi cerminan dari apa yang paling dibutuhkan warga Kota Bekasi hari ini seperti jalan yang tidak berlubang, air bersih yang mengalir, udara yang lebih sehat, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, dan ekonomi yang memberikan ruang bagi semua orang untuk tumbuh. Ketika tema ini benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata warga, barulah bisa dikatakan bahwa perencanaan pembangunan telah berhasil.

Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 ini, pada akhirnya, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju visi yang lebih besar: "Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan", sebuah visi yang tidak akan tercapai dalam satu malam, tidak pula dalam satu tahun anggaran. Ia adalah visi yang dibangun setapak demi setapak, program demi program, tahun demi tahun dengan kesabaran, konsistensi, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah investasi nyata bagi generasi Kota Bekasi yang akan datang.

Dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus bergerak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dicanangkan. Kaidah dan prinsip yang telah diuraikan ini, diharapkan agar pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik, lancar, dan transparan.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 16